

PETA JALAN SDGs:
STRATEGI, PRIORITAS, DAN IMPLEMENTASI PRAKTIS
UNTUK PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN

Prof. Dr. Muḥammad Amir Arḥam, M.E.
Citra Aditya Kusuma, B.Com., MIB
Dr. Abid, S.S., MA TESOL



UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PETA JALAN SDGs:
STRATEGI, PRIORITAS, DAN IMPLEMENTASI PRAKTIS
UNTUK PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN**

Penulis:

Prof. Dr. Muhammad Amir Arham, M.E.
Citra Aditya Kusuma, B.Com., MIB
Dr. Abid, S.S., MA TESOL

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vii,106, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-427-8

Cetakan Pertama:

Juni 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan berkah dan ridhoNya, sehingga buku berjudul “Peta Jalan SDGs: Strategi, Prioritas, dan Implementasi Praktis untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan” ini dapat tersusun dengan baik. Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang tidak hanya menjadi fokus negara-negara maju, tetapi juga menjadi prioritas bagi negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai negara dengan populasi besar dan keberagaman yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan SDGs. Peran penting dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal sangatlah krusial dalam memastikan bahwa SDGs dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat hingga daerah untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan SDGs ke dalam kebijakan pembangunan.

Buku yang kami sajikan ini berupaya menguraikan secara komprehensif langkah-langkah strategis dan prioritas isu dalam mencapai tujuan SDGs, khususnya di Kota Gorontalo. Buku ini disusun dengan tujuan memberikan panduan yang jelas dan terperinci bagi para pembuat kebijakan, akademisi, praktisi pembangunan, dan semua pemangku kepentingan yang berperan dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Penyusunan buku ini tentunya masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri atas kritik dan saran demi perbaikan ke depan. Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.

Hormat kami,

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Pengantar.....	1
1.2 Struktur Buku.....	3
Bab II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	5
2.1 Pengenalan Konsep SDGs.....	5
2.2 Tujuan, Target, dan Indikator SDGs di Indonesia.....	6
2.3 Integrasi SDGs dalam Agenda Pembangunan Nasional dan Daerah.....	18
2.3.1 Matriks Sebagai Media Integrasi SDGs.....	19
2.3.2 Aksi Lokal dalam Pencapaian SDGs.....	22
2.3.3 Praktik Baik SDGs di Indonesia.....	25
Bab III Mengenal Kota Gorontalo Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan.....	32
3.1 Potret Geografis dan Demografis Kota Gorontalo.....	33
3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Gorontalo.....	36
3.3 Kewenangan Wilayah Dalam Pencapaian SDGs.....	39
3.3.1 Pilar Pembangunan Sosial.....	41
3.3.2 Pilar Pembangunan Lingkungan.....	48
3.3.3 Pilar Pembangunan Ekonomi.....	52
3.3.4 Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.....	57
Bab IV Peluang Dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan.....	60
4.1 Mengukur pencapaian SDGs.....	60
4.2 Memahami Proyeksi Capaian SDGs: Pendekatan Praktis.....	61
4.3 Peluang Dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan.....	81
4.3.1 Kriteria Pendorong Pencapaian Target SDGs.....	81
4.3.2 Prioritas Isu SDGs.....	86
4.3.3 Tantangan dan Peluang.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	10
Tabel 2 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk, 2023	34
Tabel 3 Indikator Kemiskinan Tahun 2019-2023	38
Tabel 4 Urutan Prioritas Kriteria Pencapaian SDGs	85
Tabel 5 Pembobotan Skor Prioritas Isu SDGs	87
Tabel 6 Prioritas Isu SDGs Berdasarkan Faktor Pendukung	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Metadata Indikator SDGs Indonesia Edisi I dan II	8
Gambar 2 Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan	19
Gambar 3 Matriks Rencana Capaian SDGs	20
Gambar 4 Matriks Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah	21
Gambar 5 Matriks Rencana Program/Kegiatan Non-Pemerintah (Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi, Akademia)	22
Gambar 6 Peta Kota Gorontalo	34
Gambar 8 Indeks Pembangunan Manusia	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGANTAR

Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi landasan penting dalam upaya pembangunan di segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang merupakan tujuan utama bagi setiap negara dan wilayah. Namun, di era modern ini, pertumbuhan ekonomi tidak lagi diukur semata-mata dari sudut pandang kemakmuran materi. Perlu adanya keseimbangan yang harmonis antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan sosial untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara utuh. Dalam konteks inilah konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) menjadi semakin relevan.

SDGs terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Sebanyak 169 target tersebar dalam 17 tujuan tersebut yang menekankan agenda untuk pembangunan berkelanjutan mencakup pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan di seluruh negara. Saat ini, fokus perhatian para pemimpin dunia pun telah bergeser dari kesepakatan menuju implementasi dan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. SDGs menjadi panduan universal bagi negara-negara anggota untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan yang dihadapi, mulai dari isu kemiskinan, isu ketimpangan, isu ketidaksetaraan, hingga isu lingkungan.

Dalam perkembangannya, pencapaian SDGs nyatanya tidak hanya membutuhkan intervensi melalui sistem PBB, tetapi juga dukungan politik dan alokasi sumber daya yang melibatkan berbagai pihak, termasuk di tingkat regional, nasional, dan dari beragam pemangku kepentingan. Di Indonesia, kawasan Indonesia Timur menunjukkan potensi dan tantangan tersendiri dalam pencapaian tujuan SDGs. Teluk Tomini, sebagai salah satu kawasan

strategis di wilayah Indonesia Timur, memberikan contoh bagaimana penerapan SDGs di kawasan tersebut memiliki kekhasan dan relevansi yang penting. Secara geografis, Teluk Tomini terletak di Pulau Sulawesi dengan cakupan luas sekitar 6.000.000 hektar melintasi garis khatulistiwa dan garis *Wallace-Weber*. Teluk ini tergolong sebagai perairan semi tertutup yang langsung berbatasan dengan tiga provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (Muzakir & Suparman, 2016).

Kawasan Teluk Tomini memiliki sumber daya alam yang kaya dan beragam, namun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan wilayah yang berkelanjutan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi di kawasan ini adalah menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan pelestarian ekosistem laut yang rentan terhadap kerusakan lingkungan yang signifikan. Selain aspek sumber daya alam, aspek sosial juga menjadi fokus penting dalam mencapai SDGs di kawasan tersebut. Kawasan Indonesia Timur sering kali memiliki tingkat kemiskinan dan akses terhadap layanan dasar yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Teluk Tomini perlu memperhatikan aspek ketersediaan pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Upaya untuk menjaga kelestarian Teluk Tomini memiliki implikasi yang luas terhadap kesejahteraan dan pembangunan sosial masyarakat lokal. Konservasi Teluk Tomini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dan inklusif dari masyarakat lokal maupun berbagai pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan mempertahankan sumber daya alam yang penting bagi mata pencaharian sebagian masyarakat, termasuk di wilayah Kota Gorontalo yang masuk dalam kawasan Teluk Tomini. Selain mempertahankan mata pencaharian, kelestarian Teluk Tomini juga dapat mendorong upaya promosi pariwisata berkelanjutan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial dan budaya lokal.

Dalam perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan, buku ini dapat menjadi kompas yang memberikan panduan sistematis bagi pemerintah Kota Gorontalo untuk menyusun program-program kerja yang relevan dalam percepatan pencapaian tujuan global SDGs tahun 2030. Kolaborasi lintas

sektor dan pemangku kepentingan akan menjadi elemen penting dalam memperkuat upaya implementasi SDGs. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, langkah-langkah implementasi yang disusun akan memperhitungkan berbagai aspek dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

1.2 STRUKTUR BUKU

Teluk Tomini, wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, memiliki potensi besar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan. Namun dalam perjalanan menuju tujuan ini, banyak tantangan yang harus dihadapi terutama di Kota Gorontalo sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial utama di kawasan Teluk Tomini. Untuk mendukung refleksi kritis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi program kerja, buku ini selanjutnya menyajikan pembahasan yang mendalam tentang isu-isu strategis yang masih menjadi hambatan dalam pencapaian SDGs di Kota Gorontalo:

Bab 2 memperkenalkan SDGs secara menyeluruh mulai dari pengenalan konsep hingga tujuan dan isi setiap tujuan. Bab ini juga akan menguraikan pentingnya peran aksi lokal dalam mencapai tujuan-tujuan ini serta menggambarkan bagaimana partisipasi aktif masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan sektor swasta sangat diperlukan.

Bab 3 memberikan gambaran umum tentang kondisi Kota Gorontalo yang mencakup aspek geografi, demografi, dan lingkungan. Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah Teluk Tomini, Kota Gorontalo memiliki peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui penjelasan pada bab ini, pembaca akan dapat menangkap dinamika perkembangan Kota Gorontalo dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian SDGs di wilayah ini.

Bab 4 mengurai pencapaian SDGs di Kota Gorontalo dan memberikan tinjauan tentang status pencapaiannya hingga saat ini. Bab ini juga akan mengurai isu-isu strategis yang masih menjadi tantangan dalam pencapaian tujuan SDGs di wilayah Kota Gorontalo. Pemahaman yang mendalam tentang kondisi Kota Gorontalo akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana tantangan dalam mencapai SDGs dapat diatasi sehingga

memungkinkan dilakukannya pengembangan strategi yang lebih efektif dalam mencapai tujuan SDGs.

BAB II

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

2.1 PENGENALAN KONSEP SDGS

Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, adalah serangkaian tujuan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Agenda ini menyatukan upaya global untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini, seperti kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, dan keadilan sosial. SDGs terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target spesifik yang mencakup beragam aspek pembangunan di tingkat global, nasional, dan lokal (Hák et al., 2016). SDGs memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan terstruktur bagi seluruh pihak yang terkait untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Awal mula pengembangan kerangka pembangunan global dimulai dengan pengadopsian delapan Tujuan Pembangunan Milenium atau dikenal dengan istilah *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000 oleh negara-negara anggota PBB. Kerangka kerja MDGs ini dikembangkan untuk menangani masalah-masalah krusial yang dihadapi oleh dunia pada saat itu, seperti tingginya angka kematian anak, kemiskinan ekstrem, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dan kerusakan lingkungan.

MDGs dinyatakan sebagai tonggak penting dalam upaya global untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Selama 15 tahun implementasinya, terdapat progres yang signifikan dalam pencapaian tujuan-tujuan MDGs. Namun demikian, pencapaian dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti perbaikan gizi, akses pendidikan, kesetaraan gender, dan pemeliharaan lingkungan masih memerlukan tindakan lebih lanjut untuk memaksimalkannya. Dengan berakhirnya periode MDGs pada tahun 2015, muncul kebutuhan akan pendekatan yang lebih luas dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan. Hal inilah yang

kemudian mendorong kemunculan *Sustainable Development Goals* (SDGs), sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan dalam pencapaian MDGs dan menanggapi tantangan baru yang muncul di abad ke-21. SDGs menjadi komitmen global untuk menciptakan perubahan yang signifikan dan menjaga kelangsungan hidup manusia di masa depan. SDGs memberikan kerangka kerja bagi pembangunan yang berkelanjutan, memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia tanpa merusak lingkungan, serta memastikan keberlanjutan ini bagi generasi mendatang. Dibandingkan dengan MDGs, SDGs memiliki konsep yang lebih komprehensif dan bertujuan menargetkan akar permasalahan kemiskinan. Tidak hanya berskala lokal atau regional, namun SDGs bersifat universal yang menjangkau masalah dan tantangan di semua negara.

Setiap tujuan SDGs memiliki serangkaian indikator yang mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut. Indikator-indikator ini tidak hanya memberikan pandangan menyeluruh tentang kondisi pembangunan suatu negara atau wilayah, tetapi juga membantu mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan (UNDP, 2017). Sebagai contoh, tujuan ke-1 SDGs dengan fokus utama pada “Pengentasan Kemiskinan” memiliki indikator seperti tingkat pengangguran, proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan akses terhadap layanan kesehatan dasar, yang menjadi tolak ukur upaya pencapaian target 0% kemiskinan di tahun 2030. Dengan adanya indikator yang terukur, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat menyusun strategi pembangunan berkelanjutan yang holistik dan tepat sasaran (Kanie & Biermann, 2017).

2.2 TUJUAN, TARGET, DAN INDIKATOR SDGS DI INDONESIA

Pengenalan konsep SDGs dalam konteks pembangunan wilayah bukan hanya tentang pemahaman teoritis, tetapi juga mengenai penerapan praktis dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan SDGs. Perpres ini menetapkan bahwa untuk mencapai sasaran, perlu disusun 3 dokumen perencanaan yaitu: Peta Jalan SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs,

dan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Provinsi. Dokumen-dokumen ini yang kemudian menjadi pedoman dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam agenda pembangunan nasional dan daerah.

Menyadari relevansi SDGs dalam konteks pembangunan wilayah, banyak inisiatif telah diluncurkan di berbagai daerah untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam perencanaan pembangunan lokal. Contohnya, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Gorontalo melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) yang diselaraskan dengan tujuan-tujuan SDGs. Sejumlah kabupaten/kota juga telah memulai langkah-langkah untuk menerapkan SDGs dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan lokal. Upaya penyelarasan ini tidak hanya membantu meningkatkan koordinasi antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam pembangunan wilayah tetapi juga membawa dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Melalui keterlibatan aktif dan partisipasi semua pihak, SDGs dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien sehingga memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan wilayah (Nash et al., 2020).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), sebagai bagian dari pemerintah yang menjadi motor penggerak implementasi SDGs di Indonesia, selanjutnya menerbitkan buku metadata yang menjadi acuan utama atas indikator-indikator SDGs. **Metadata Indikator SDGs Indonesia** adalah dokumen acuan atau rujukan atas indikator-indikator nasional SDGs di Indonesia dan sebagai panduan alat ukur atau definisi operasional (metode dan sumber data) untuk setiap indikator. Metadata ini mencakup definisi, deskripsi, dan klarifikasi dari setiap indikator yang digunakan dalam pemantauan *progress* pencapaian target-target SDGs. Penjelasan detail terkait deskripsi, target, metode pengukuran, wilayah agregasi dari setiap tujuan pembangunan didasarkan pada dokumen ini sehingga seluruh daerah di Indonesia memiliki sistem evaluasi yang seragam dalam mengukur kesiapan dan pencapaian target SDGs, baik pada level daerah maupun nasional.

Dalam perkembangannya, Bappenas telah mengeluarkan 2 edisi dokumen Metadata Indikator SDGs Indonesia sebagaimana yang terlihat pada Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1 Metadatas Indikator SDGs Indonesia Edisi I dan II

Metadatas Indikator SDGs Indonesia Edisi I diterbitkan pada tahun 2017 dan menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs 2017-2019. Edisi ini memuat jumlah indikator dan target yang ditetapkan berjumlah 319 indikator nasional dan 94 target yang *mainstream* dengan RPJMN 2015-2019. Pada tahun 2020, Metadatas Indikator SDGs Indonesia Edisi II diterbitkan yang memuat sejumlah perubahan dan penyempurnaan dari dokumen Metadatas sebelumnya. Metadatas Edisi II ini menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs 2021-2024 dengan menetapkan indikator sebanyak 289 indikator nasional dan 124 target. Penyesuaian terhadap jumlah indikator ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tujuan dan indikator mencerminkan tantangan dan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh negara ini. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih efektif dalam mengukur dan mengelola kemajuan dalam mencapai SDGs sesuai dengan konteks wilayahnya.

Untuk memudahkan pemahaman dan implementasinya, 17 Tujuan SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar pembangunan yang mencerminkan tantangan dan potensi pembangunan Indonesia yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial

Pilar ini berisi 5 tujuan yang meliputi isu kemiskinan; kelaparan; kehidupan sehat dan sejahtera; pendidikan berkualitas; dan kesetaraan gender. Pilar ini menyoroti pentingnya penyediaan layanan dasar dan kesetaraan akses terhadap sumber daya bagi semua dalam upaya menghapus kemiskinan di segala aspek.

2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar ini berisi 5 tujuan yang meliputi isu energi bersih dan terjangkau; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi dan infrastruktur; kesenjangan; dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Pilar ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat sektor perindustrian.

3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pilar ini berisi 6 tujuan yang meliputi isu air bersih dan sanitasi layak; kota dan permukiman yang berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; penanganan perubahan iklim; ekosistem lautan; dan ekosistem daratan. Pilar ini menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Komitmen untuk mengatasi tantangan terkait energi, perubahan iklim, dan pelestarian ekosistem menjadi fokus utama dalam pilar ini.

4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pilar ini berisi 1 tujuan tentang perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Pilar ini menekankan pentingnya tata kelola yang efektif, inklusif dan berkeadilan. Membangun perdamaian, keadilan, dan lembaga pemerintah yang kuat dan efisien menjadi kunci bagi pembangunan berkelanjutan dalam pilar ini.

Pengelompokan ini membantu dalam menyoroti hubungan yang saling terkait antara berbagai aspek pembangunan dan mempercepat pencapaian target-target SDGs sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat. Berikut ini daftar 17 tujuan SDGs yang mencakup

berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola:

Tabel 1 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan 1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun
Tujuan 2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
Tujuan 3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
Tujuan 4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
Tujuan 5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum Perempuan
Tujuan 6	Air bersih dan sanitasi layak
Tujuan 7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
Tujuan 8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
Tujuan 9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
Tujuan 10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
Tujuan 11	Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
Tujuan 12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
Tujuan 13	Penanganan perubahan iklim
Tujuan 14	Ekosistem lautan
Tujuan 15	Ekosistem daratan
Tujuan 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
Tujuan 17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Sumber: Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia, 2020

Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Tujuan ini menetapkan suatu visi di mana setiap individu memiliki akses terhadap standar hidup yang layak, termasuk makanan, air bersih, sanitasi, perumahan yang layak, dan layanan kesehatan dasar. Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tentang mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi juga mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan akses terhadap sumber daya bagi masyarakat yang berada di garis kemiskinan atau rentan terhadap kemiskinan. Pencapaian Tujuan 1 memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara dalam mengakses kesempatan dan sumber daya tanpa diskriminasi. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan ini meliputi peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, pengembangan sistem perlindungan sosial yang inklusif, akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang meningkatkan akses terhadap sumber daya seperti air bersih dan sanitasi.

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 merupakan komitmen global untuk mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan. Dengan memiliki akses terhadap makanan yang cukup, bergizi, dan sehat, setiap individu memiliki potensi untuk hidup sehat dan produktif. Tujuan ini diintegrasikan dengan menyelaraskan kebijakan nasional dan internasional *Food and Agriculture Organization* (FAO) untuk menanggulangi kelaparan dan memastikan keamanan pangan bagi semua orang, khususnya individu yang rentan. Mengatasi masalah kelaparan tidak hanya dilakukan dengan memastikan pasokan makanan yang cukup, tetapi juga memperhatikan kualitas makanan, keberlanjutan sistem pangan, dan resiliensi terhadap perubahan iklim. Selain itu, fokus dari upaya pencapaian tujuan ini tidak hanya menyangkut aspek ketersediaan pangan, tetapi juga kualitas gizi yang diterima oleh individu yang diukur melalui tingkat stunting. Dengan demikian, integrasi antara ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial menjadi kunci dalam mencapai Tujuan 2 SDG.

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan ke-3 SDG merupakan landasan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia. Fokus utama tujuan ini adalah untuk memastikan semua orang memiliki akses yang adil dan layak

terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, serta untuk meningkatkan upaya dalam pencegahan, pengobatan, dan penanggulangan berbagai penyakit, termasuk penyakit menular dan tidak menular. Tujuan ini mencakup beberapa target, antara lain penurunan angka kematian bayi dan anak balita, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dasar, serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, dan tuberkulosis. Selain itu, tujuan ini juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental, mengatasi penyakit menular tertentu seperti hepatitis dan penyakit menular lainnya, serta mengurangi angka kematian dan cedera yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas dan bencana alam.

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Tujuan keempat dari SDGs yaitu Pendidikan Berkualitas. Tujuan ini menjadi pilar penting dalam upaya mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat dan memastikan semua orang (anak-anak dan dewasa) mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang relevan untuk kehidupan yang berkelanjutan. Pendidikan berkualitas di SDGs mencakup akses yang setara terhadap pendidikan dasar dan menengah yang bermutu, dengan penekanan pada peningkatan tingkat melek huruf dan keterampilan matematika dasar. Selain itu, tujuan ini menggarisbawahi pentingnya akses terhadap pendidikan tinggi, pelatihan teknis, dan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta peningkatan kualitas guru dan infrastruktur pendidikan. Dengan memastikan semua individu memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang bermutu, maka akan tercipta kondisi dimana setiap individu memiliki kesempatan untuk mencapai potensi maksimalnya dan berkontribusi secara positif pada pembangunan sosial dan ekonomi.

Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Tujuan ini fokus pada isu Kesetaraan Gender dan menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan ini tidak hanya berfokus pada mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di semua lapisan masyarakat. Tujuan 5 memiliki beberapa target spesifik yang harus dicapai untuk mencapai kesetaraan gender, yaitu akses perempuan terhadap pendidikan yang berkualitas, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan

politik dan ekonomi, serta penghapusan praktik-praktik yang merugikan perempuan, seperti pernikahan anak dan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, integrasi Tujuan 5 SDG dalam agenda pembangunan nasional dan daerah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa upaya-upaya dalam mencapai kesetaraan gender menjadi prioritas utama dalam pembangunan.

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 menyoroti pentingnya akses yang adil dan aman terhadap air bersih serta sanitasi yang memadai bagi semua orang. Fokus pada tujuan ini tidak hanya pada pemanfaatan air bersih, tetapi juga pada ketersediaan sanitasi yang layak, seperti toilet yang aman dan higienis, serta pengelolaan limbah yang efisien. Akses terhadap air bersih merupakan hak asasi manusia yang mendasar, dan ketersediaannya memengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan keberlanjutan lingkungan. Demikian pula, sanitasi yang layak memainkan peran penting dalam mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam upaya pencapaian tujuan ini, penting untuk memperhatikan dampak perubahan iklim terhadap akses air bersih dan sanitasi. Perubahan cuaca yang ekstrem dapat menyebabkan ketersediaan air yang tidak pasti serta meningkatkan risiko pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, perlu diterapkannya perencanaan yang adaptif dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim dalam pengelolaan sumber daya air dan sanitasi.

Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Pada Tujuan ke-7 SDG, memastikan akses universal terhadap energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang menjadi target utama yang harus dicapai di tahun 2030. Upaya ini mencakup dua aspek penting, yaitu pertama, meningkatkan akses terhadap layanan energi modern, dan kedua, meningkatkan efisiensi energi dan meningkatkan porsi energi terbarukan dalam campuran energi global. Akses yang memadai terhadap energi berdampak pada banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, tujuan ini menuntut adanya investasi dalam infrastruktur energi yang mencakup sumber energi yang bersih dan terjangkau. Melalui upaya pembangunan untuk mencapai Tujuan 7, diharapkan semua orang akan memiliki akses yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan terhadap energi modern. Hal ini tidak hanya

akan meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan 8 SDGs bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta memberikan pekerjaan yang layak bagi semua orang. Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya menciptakan kesempatan kerja yang produktif dan memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status sosial ekonomi. Pada intinya, tujuan ini berfokus pada penciptaan lapangan kerja yang produktif dan layak, meningkatkan akses terhadap pelatihan dan pendidikan, serta memastikan perlindungan sosial bagi pekerja, terutama di sektor-sektor yang rentan. Di dalam tujuan ini terdapat beberapa target yang harus dicapai, seperti mengurangi angka pengangguran, khususnya di kalangan pemuda dan perempuan, serta meningkatkan akses terhadap pekerjaan layak dan produktif. Selain itu, tujuan ini juga mencakup upaya untuk mengurangi ketimpangan upah, memastikan kesetaraan akses bagi perempuan dan laki-laki dalam hal pekerjaan dan kewirausahaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja.

Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Memajukan infrastruktur yang tangguh, promosi industrialisasi yang inklusif, dan meningkatkan inovasi menjadi target yang akan dicapai dalam Tujuan 9. Dalam konteks pembangunan global, tujuan ini memegang peranan penting karena infrastruktur yang kuat dan industri yang berkembang merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek penting dari Tujuan 9 adalah memastikan akses yang merata terhadap infrastruktur yang berkualitas, khususnya di negara-negara berkembang. Selain itu, Tujuan 9 juga menekankan pentingnya pengembangan industri yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan. Di samping itu, inovasi juga menjadi fokus utama dalam tujuan ini, karena inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kemampuan adaptasi suatu bangsa terhadap perubahan global. Dengan demikian, Tujuan 9 SDGs menekankan pentingnya infrastruktur yang tangguh, pertumbuhan industri yang inklusif, serta inovasi sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan yang merata, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Salah satu indikator kunci dalam mencapai Tujuan 10 adalah mengurangi kesenjangan pendapatan, baik di antara negara-negara maupun di dalam suatu negara. Kesenjangan yang dimaksud mencakup berbagai aspek, seperti kesenjangan pendapatan, kesenjangan antara kota dan desa, kesenjangan gender, serta kesenjangan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi fokus lain dalam tujuan ini. Dengan mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, diharapkan semua penduduk, tanpa memandang lokasi tempat tinggal, dapat menikmati kemajuan pembangunan. Selain itu, kesenjangan gender juga menjadi sorotan dalam Tujuan 10. Mempromosikan kesetaraan gender dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keputusan politik adalah langkah penting untuk mengurangi kesenjangan yang dapat menghambat proses pembangunan.

Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Fokus dari Tujuan 11 adalah menciptakan kota yang inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan secara lingkungan. Hal ini penting karena perkotaan merupakan pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Sejumlah indikator yang tercakup dalam Tujuan 11 bertujuan untuk memastikan bahwa kota-kota tumbuh secara berkelanjutan, mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti akses yang adil terhadap perumahan yang layak, transportasi publik yang terjangkau, lingkungan perkotaan yang hijau dan berkelanjutan, serta peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana. Selanjutnya, Tujuan 11 juga menekankan pentingnya perlindungan dan pelestarian warisan budaya serta peningkatan aksesibilitas bagi semua termasuk bagi penyandang disabilitas. Hal ini mencakup pemeliharaan situs sejarah dan kebudayaan, serta pembangunan infrastruktur yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tujuan ini memiliki peran yang sangat penting karena konsumsi dan produksi yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, mengancam kesehatan manusia, serta berkontribusi pada ketidaksetaraan

sosial dan ekonomi. Secara khusus, Tujuan 12 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gaya hidup yang berkelanjutan, baik di tingkat individu maupun di tingkat perusahaan dan organisasi. Hal ini mencakup pengurangan pemborosan, penggunaan sumber daya secara efisien, dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Salah satu fokus utama Tujuan 12 adalah mengurangi jejak karbon dan emisi gas rumah kaca dari konsumsi dan produksi serta mempromosikan praktik produksi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Penerapan prinsip konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab juga berarti memastikan akses yang adil dan berkelanjutan terhadap sumber daya alam bagi seluruh pihak.

Tujuan 13. Penanganan dan Perubahan Iklim

Tujuan 13 fokus pada urgensi dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Di tengah ancaman terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia, penanganan perubahan iklim menjadi kunci untuk menciptakan masa depan yang aman dan berkelanjutan. SDG 13 menekankan perlunya tindakan bersama secara global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta mengadaptasi diri terhadap dampak yang sudah ada dan yang akan datang. Adapun indikator pengukuran dalam upaya pencapaian target pada Tujuan 13 meliputi potensi penurunan emisi gas rumah kaca, potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, jumlah satuan pendidikan dan komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup, persentase adopsi dan implementasi strategi penanggulangan bencana daerah, dan jumlah dana public untuk pendanaan perubahan iklim.

Tujuan 14. Ekosistem Lautan

“Life Below Water” atau Kehidupan di Bawah Air menjadi fokus pada Tujuan 14 yang menekankan pentingnya pelestarian dan pengelolaan ekosistem laut, termasuk laut terbuka dan laut pantai, serta ekosistem-ekosistem terkait seperti sungai dan danau. Tujuan ini secara khusus merujuk pada pelestarian keanekaragaman hayati laut, pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, serta upaya untuk mengurangi polusi laut dan perlindungan lingkungan laut dari dampak negatif aktivitas manusia. Indikator-indikator dalam Tujuan 14 ini menekankan pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati di laut, pencegahan polusi laut, dan perlindungan lingkungan laut dari dampak negatif aktivitas manusia. Polusi laut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti limbah industri, sampah plastik, dan

polusi kimia. Secara keseluruhan, Tujuan 14 SDG bertujuan untuk mempertahankan ekosistem laut yang sehat karena memiliki dampak besar pada kehidupan di daratan dan ekonomi global.

Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Ekosistem Daratan merupakan bagian penting dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan manusia di daratan. Fokus utama dari Tujuan 15 adalah untuk melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pemanfaatan yang berkelanjutan bagi ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi degradasi lahan, dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Pencapaian tujuan ini tidak hanya akan memastikan keberlanjutan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia, tetapi juga akan mendukung mitigasi terhadap perubahan iklim. Tujuan 15 menggarisbawahi pentingnya restorasi lahan yang telah terdegradasi akibat dari penggundulan hutan dan praktik pertanian yang merusak. Signifikansi dari pengelolaan ekosistem daratan adalah ketersediaan makanan, air bersih, dan obat-obatan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, melestarikan keanekaragaman hayati dan habitatnya adalah kunci dalam mendukung ketahanan pangan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia. Selain itu, melalui pelestarian ekosistem daratan juga diharapkan dapat mengurangi risiko bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor.

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 bertujuan untuk memastikan terciptanya masyarakat yang damai, inklusif, serta berkeadilan melalui pembangunan institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Keadilan dan inklusivitas adalah elemen penting dari tujuan ini. Pembangunan institusi yang tangguh dan akuntabel adalah kunci untuk mencapai perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan. Institusi yang kuat dan efisien membantu memastikan penegakan hukum yang adil, pengurangan praktik korupsi, dan pemberian layanan publik yang berkualitas. Selain itu, Tujuan 16 menekankan perdamaian berkelanjutan yang mencakup upaya untuk mengakhiri konflik dan kekerasan dalam segala bentuk di seluruh dunia. Hal ini termasuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Upaya untuk memastikan akses yang adil terhadap keadilan bagi semua merupakan bagian integral dari pencapaian tujuan ini.

Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

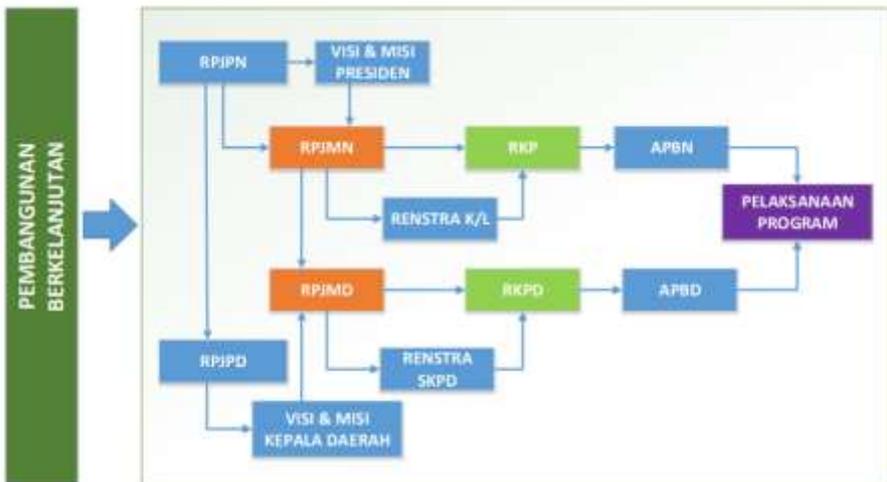
Tujuan terakhir dalam SDGs yaitu Tujuan 17 dan merupakan inti dari seluruh Agenda 2030. Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama lintas-sektor dan lintas-negara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kemitraan dianggap sebagai alat yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya, teknologi, dan pengetahuan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan SDGs. Tujuan ini mencakup berbagai aspek penting yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, lembaga akademis, dan organisasi internasional. Selain itu, tujuan ini juga menggalang kemitraan yang berkelanjutan antara sektor publik dan swasta, yang diharapkan dapat meningkatkan inovasi, investasi, dan akses terhadap teknologi yang ramah lingkungan. Dengan demikian, tujuan ini mencerminkan pentingnya kolaborasi global dalam mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks dan lintas-batas serta memastikan bahwa tidak ada yang ditinggalkan dalam perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan.

2.3 INTEGRASI SDGS DALAM AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

Seiring dengan pengadopsian SDGs secara global, Indonesia juga berupaya untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam agenda pembangunan nasional maupun daerah. Integrasi ini menjadi suatu keharusan dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara nasional, sebanyak 124 target SDGs telah terintegrasi dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mendorong pencapaian target Agenda 2030 di negara ini. SDGs memberikan panduan yang jelas dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada hasil yang berkelanjutan dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Meskipun dunia dan Indonesia sempat dilanda pandemi COVID-19 yang sangat berat, namun upaya pemerintah dalam merumuskan Rencana Aksi baik di tingkat pusat maupun daerah tetap dilaksanakan. Langkah ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pemerintah pusat dan daerah

terhadap pencapaian target SDGs secara inklusif. Pada level daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), pemerintah dapat mengintegrasikan prioritas pembangunan yang sesuai dengan konteks lokal, seperti tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, atau kerentanan terhadap perubahan lingkungan. Sementara itu, pada level nasional, pemerintah pusat memastikan konsistensi dan kesesuaian kebijakan yang diimplementasikan di seluruh wilayah negara. Integrasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah tentunya akan meminimalisir risiko terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mencapai target pembangunan yang diharapkan.



Gambar 2 Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan

(Sumber: *Buku Pedoman Rencana Aksi SDG, n.d.*)

2.3.1 Matriks Sebagai Media Integrasi SDGs

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) memerlukan strategi yang sistematis dan terukur. Di dalam konteks ini, penggunaan matriks untuk merencanakan dan mengelola berbagai aspek terkait SDGs menjadi sangat krusial. Matriks yang digunakan mencakup tiga komponen utama, yaitu: **Matriks 1** berisi Rencana Capaian Indikator SDGs, **Matriks 2** berisi Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Pemerintah yang relevan dalam

mendukung pencapaian target tiap indikator; dan Matriks 3 yang berisi Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran *Non-State Actor* yang relevan dalam mendukung pencapaian target tiap indikator. Setiap matriks memainkan peran penting dalam memastikan koordinasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan.

Matriks 1: Rencana Capaian Indikator SDGs

Matriks 1 mencakup rencana capaian indikator SDGs yang memetakan target dan data spesifik dalam jangka waktu tertentu. Matriks ini berfungsi sebagai panduan utama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami kemajuan yang harus dicapai. Matriks ini tidak hanya memberikan visi jangka panjang tetapi juga membantu mengidentifikasi titik-titik kritis di mana intervensi lebih diperlukan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Matriks 1 memainkan peran vital dalam memastikan bahwa setiap indikator SDGs memiliki target yang jelas dan terukur. Setiap target ditetapkan berdasarkan analisis data dan kebutuhan lokal yang spesifik sehingga sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah dapat dialokasikan secara efektif. Basis data yang dihasilkan pada Matriks 1 membantu mengarahkan upaya pembangunan agar lebih fokus dan tepat sasaran.

NAMA TUJUAN SDGs (1)									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (Baseline) (7)	Target Pencapaian (8)				
					2018	2021	2022	2023	2024
Target SDGs (2)									

Gambar 3 Matriks Rencana Capaian SDGs

Matriks 2: Program, Kegiatan, dan Alokasi Anggaran Pemerintah

Matriks 2 merinci program, kegiatan, dan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk mencapai indikator-indikator SDGs yang telah ditetapkan dalam Matriks 1. Matriks ini mencakup alokasi sumber daya finansial, manusia, dan teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program terkait. Setiap indikator SDGs memiliki program dan kegiatan yang spesifik serta pembiayaan tersendiri melalui anggaran pemerintah daerah.

Contohnya, untuk mencapai indikator peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dasar, dalam Matriks 2 akan dicantumkan program-program seperti pembangunan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), pelatihan tenaga medis, dan penyediaan obat-obatan. Anggaran yang dialokasikan akan diuraikan secara rinci untuk memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki dana yang cukup untuk pelaksanaannya. Hal ini memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

NAMA TUJUAN SDGs

Program/Kegiatan/SubKegiatan (1)	Sektor (2)	Target Tahunan (3)					Indikator Kinerja Anggaran 5 tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2020	2021	2022	2023	2024				
PROGRAM PEMBENTAY DAERAH										
Kode dan Nama Indikator TPN/SDGs										
Kode dan Nama Program										
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub-Kegiatan	Nama Sub-Kegiatan							
		Kode Sub-Kegiatan	Nama Sub-Kegiatan							
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub-Kegiatan	Nama Sub-Kegiatan							
		Kode Sub-Kegiatan	Nama Sub-Kegiatan							

Gambar 4 Matriks Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah

Matriks 3: Program, Kegiatan, dan Alokasi Anggaran *Non-State Actor*

Matriks 3 melibatkan program, kegiatan, dan anggaran yang disusun oleh pihak *non-state actor*, seperti organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional. Aktor-aktor ini memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan SDGs karena ketersediaan keahlian, sumber daya, dan jaringan yang dapat mendukung implementasi program dan kegiatan pemerintah. Misalnya, dalam upaya mengurangi kemiskinan, sektor swasta dapat terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja. Organisasi masyarakat sipil dapat menjalankan program-program pemberdayaan komunitas dan advokasi hak-hak sosial. Matriks 3 akan merinci kontribusi setiap aktor non-pemerintah terhadap indikator-indikator SDGs, memastikan bahwa semua pihak bekerja secara harmonis dan saling melengkapi.

NAMA TUJUAN SDGs

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Sasaran (2)	Target Tahunan (3)					Indikator Aksi/Angekan (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Lembaga Pelaksana (7)
		2020	2021	2022	2023	2024				
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Kode dan Nama Indikator (PBI/SDGs)										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1. Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 1:	1.2. Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1. Output Kegiatan									

Gambar 5 Matriks Rencana Program/Kegiatan Non-Pemerintah (Organisasi Masyarakat, Filantropi, Akademia)

Pemetaan dan pengelolaan indikator SDGs melalui Matriks 1, 2, dan 3 merupakan pendekatan yang holistik dan strategis untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil menuju pencapaian SDGs dilakukan dengan cara yang terencana, terukur, dan inklusif. Ketiga matriks ini memudahkan pemerintah dalam memonitor dan mengevaluasi kemajuan setiap capaian indikator SDGs, mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan, serta menyesuaikan strategi dan program sesuai kebutuhan. Penggunaan matriks juga memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik karena setiap program dan kegiatan yang direncanakan serta anggaran yang dialokasikan dapat dilacak dan dievaluasi. Hal ini menciptakan dasar yang kuat untuk mewujudkan kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

2.3.2 Aksi Lokal dalam Pencapaian SDGs

Kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai SDGs. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kolaborasi yang sinergis dari seluruh *stakeholders* memungkinkan terciptanya solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat lokal. Pemerintah, sebagai regulator dan penyedia layanan publik, memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan upaya kolaboratif ini. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan melaksanakan berbagai kebijakan dan program yang mendukung pencapaian SDGs di tingkat lokal. Salah satu

langkah penting yang diambil oleh pemerintah daerah adalah pengembangan rencana pembangunan yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip SDGs. Dalam proses penyusunan rencana tersebut, pemerintah daerah perlu melihat tantangan dan potensi pembangunan di wilayahnya. Hal ini mencakup identifikasi masalah-masalah sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum yang perlu diatasi serta potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pencapaian tujuan SDGs.

Disamping perencanaan strategi pembangunan, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program kesejahteraan masyarakat yang mendukung pencapaian SDGs. Program-program ini meliputi berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Pelaksanaan dari program-program ini tentunya memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam mengalokasikan dan mengelola anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak, serta pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Melalui kebijakan, program, dan tindakan yang diambil, maka pemerintah daerah dapat menjadi motor penggerak utama dalam mencapai SDGs dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya.

Di sisi lain, partisipasi aktif dari masyarakat lokal juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program pembangunan. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang berpotensi besar dalam mendorong pencapaian tujuan-tujuan SDGs. Organisasi masyarakat dapat merancang dan melaksanakan program-program yang berfokus pada upaya mencapai SDGs sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Misalnya, mereka dapat mengorganisir kegiatan-kegiatan sosial, pelatihan keterampilan, atau kampanye kesadaran lingkungan. Melalui kegiatan-kegiatan ini, organisasi masyarakat dapat membantu meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, serta mempromosikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan perlindungan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program, maka masyarakat akan

merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap pembangunan di wilayahnya.

Selain pemerintah dan masyarakat, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya seperti lembaga akademis, LSM, dan lembaga internasional juga memiliki peran yang sangat penting dalam kolaborasi pencapaian SDGs. Sumber daya finansial, teknologi, teknologi, inovasi, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh pihak-pihak ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks. Kemitraan yang dibangun antara pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan *stakeholders* lainnya dapat memperluas jangkauan dan dampak program-program pembangunan serta menghadirkan solusi yang lebih efektif dan efisien.

Salah satu cara utama di mana sektor swasta dapat berkontribusi adalah melalui praktik bisnis yang berkelanjutan. Praktik ini mencakup penggunaan sumber daya secara efisien, pengurangan limbah, pengembangan produk dan layanan yang ramah lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan pekerja. Melalui praktik-praktik ini, sektor swasta tidak hanya membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain melalui praktik bisnis, pada umumnya sektor swasta dan *stakeholders* lainnya mendorong pencapaian SDGs melalui investasi sosial berupa pembangunan infrastruktur, program pelatihan keterampilan, atau pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Secara keseluruhan, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal adalah kunci penggerak dalam upaya mencapai target global di tahun 2030. Dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap pihak diharapkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dapat lebih cepat terwujud dan memberikan dampak yang lebih positif dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

2.3.3 Praktik Baik SDGs di Indonesia

JOGJINAWI - Jogja Loh Jinawi (Program Pendampingan Untuk Petani)

Jogjinawi (Jogja Loh Jinawi) merupakan program pemberdayaan dan pendampingan untuk petani. Program ini hadir sebagai solusi atas sejumlah permasalahan yang dihadapi pemilik lahan, terutama terkait modal tanam, akses pupuk, dan pemasaran. Berikut penjabaran dari permasalahan-permasalahan tersebut:

1. Modal Tanam

Dalam hal modal tanam, seringkali petani mengalami kesulitan karena omset yang diperoleh lebih kecil dibandingkan biaya tanam. Modal juga sering digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, meninggalkan sedikit sisa untuk investasi kembali. Untuk mengatasi hal ini, BMT Beringharjo turut hadir memberikan modal tanam yang harus dikembalikan selama periode waktu tertentu. Dengan cara ini, petani tidak akan menggunakan modal pinjamannya untuk keperluan konsumtif dan ketika saldo dikembalikan, petani memiliki

2. Akses Pupuk

Akses terhadap pupuk menjadi permasalahan yang cukup signifikan. Petani seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pupuk subsidi yang mencukupi kebutuhan lahan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pupuk yang dapat dibuat sendiri oleh petani, terutama pupuk kandang.

3. Pemasaran

Permasalahan lainnya adalah dalam hal pemasaran hasil pertanian. Hampir seluruh petani menghadapi masalah dengan tengkulak yang membatasi akses mereka untuk menjual hasil pertanian secara langsung. Untuk mengatasi hal ini, BMT Beringharjo menciptakan Depo Simbah Harjo yang menyerap beras hasil Jogjinawi dengan harga pasaran, bukan harga tengkulak. Beras ini kemudian dijual kepada anggota peserta Program Simbah Harjo Development, termasuk angkringan dan usaha kuliner lainnya. Dengan demikian, program Jogjinawi diharapkan dapat memberikan

modal sendiri untuk produksi selanjutnya.

solusi komprehensif bagi petani dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Sasaran Program Jogjinawi

Sasaran program Jogjinawi adalah petani. Sementara ini terdapat 84 petani yang diberdayakan dan masih terbatas di daerah Kabupaten Sleman.

Tujuan Program Jogjinawi

1. Meningkatkan kesejahteraan petani karena hasil dibeli lebih tinggi dari harga tengkulak.
2. Membuka lapangan pekerjaan.
3. Menyuplai kebutuhan beras Program Simbah Harjo Development (angkringan dan kuliner lain) sebanyak 11 ton per bulan.
4. Lebih mendekatkan petani dengan agamanya karena materi pendampingan tidak sebatas tentang pertanian, tetapi juga keagamaan.

Tantangan (*Challenge*)

Tantangan dalam pertanian utamanya berkaitan dengan faktor cuaca dan irigasi yang memiliki dampak signifikan terhadap hasil panen. Selain itu, menurunnya kualitas tanah sawah setelah beberapa kali masa tanam juga menjadi perhatian serius. Untuk mengatasi permasalahan ini,

dilakukan strategi tanam bergantian antara padi dengan komoditi pertanian lain seperti jagung, cabai, atau kacang panjang. Strategi ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap tanah sawah dan meningkatkan keseimbangan nutrisi tanah, sehingga produktivitas pertanian dapat ditingkatkan dalam jangka panjang.

SDG Goals



Sumber : SDG Best Practice
Repository

(<https://sdgs.bappenas.go.id/repository/public/bf487d23-09f6-4107-976e-0a27fcd4cd5>)

Smart Farming “Lamuta” Mendukung Ketahanan Pangan dan Produksi Berkelanjutan

Peningkatan populasi berimplikasi pada peningkatan kebutuhan pangan, menjadikan sektor pertanian sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, inovasi dan teknologi yang tepat perlu terus dikembangkan agar sektor pertanian dapat secara berkelanjutan memenuhi kebutuhan pangan

Kelompok Tani Lamuta III sebagai contoh penerapan pertanian ramah lingkungan

Berangkat dari isu di atas, Kelompok Tani Lamuta III di Desa Hutabohu dibawah binaan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo berhasil membudidayakan tanaman padi menggunakan pupuk organik dengan teknologi Digital Farming.

masyarakat Gorontalo dengan aman, sehat, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data BPS, sektor pertanian merupakan sektor andalan yang memberikan kontribusi signifikan bagi PDRB Provinsi Gorontalo, yaitu sekitar 30% ke atas. Namun demikian, persentase kontribusi yang signifikan ini belum diiringi dengan pertumbuhan sektor yang optimal. Tren pertumbuhan sektor pertanian menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun dari 11,1% pada tahun 2017 menjadi 4,8% pada tahun 2019 dan terus merosot saat pandemi COVID-19 menjadi -3,7%, khususnya di sektor tanaman pangan. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan produktivitas lahan yang dipengaruhi oleh eksploitasi lahan seperti penggunaan pupuk kimia berlebihan. Apabila kondisi ini terus berlanjut maka tanah tidak akan mampu memproduksi pangan sesuai harapan.

Guna mengatasi permasalahan ini, pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya mendorong petani untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia/anorganik dan meningkatkan pemanfaatan pupuk organik yang dapat diproduksi

Konsistensi kelompok ini di tengah praktik pertanian konvensional menarik perhatian dari berbagai pihak.

Berdasarkan pada pengukuran dari tim mitra Bank Indonesia dalam mengembangkan pertanian Gorontalo, panen yang dihasilkan oleh Kelompok Tani Lamuta III menunjukkan hasil yang sangat baik karena produktivitas mencapai di angka 8,37 kg/6,25 m² atau sebesar 13,4 ton/ha. Hasil panen tersebut mencerminkan peningkatan 243% dari sebelum implementasi digital farming dan juga metode organik, karena Klaster Tani Lamuta III biasanya hanya mampu memproduksi 5,5 ton/ha. Capaian ini membuktikan bahwa penggunaan metode Digital Farming dan Total Organik mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mengurangi biaya operasional petani. Implementasi metode Total Organik sangat menguntungkan petani karena petani tidak lagi bergantung pada pupuk kimia bersubsidi.

Kemudahan dalam memantau dan monitoring informasi kondisi dan kebutuhan lahan secara *real time* menjadi keunggulan lain dari implementasi Digital Farming. Ketepatan

sendiri, seperti pengolahan limbah organik rumah tangga dan kotoran hewan ternak. Konsep pertanian terintegrasi (*integrated farming*) menjadi salah satu solusi untuk pertanian ramah lingkungan. Selain menekan biaya produksi, limbah organik lebih ramah lingkungan dan secara bertahap dapat mengembalikan kondisi tanah yang kualitasnya terkikis akibat penggunaan pupuk kimia.

Adapun isu lain yang muncul pada sektor pertanian adalah menurunnya minat masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian. Data angkatan kerja Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap 30% atau 172.483 dari 562.087 jiwa angkatan kerja. Akan tetapi, sebagian besar pekerja di sektor ini berusia 60 tahun ke atas dengan jumlah sebanyak 25.508 jiwa. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pada sektor pertanian agar menjadi lebih menarik, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi. Mekanisasi ini tidak hanya meningkatkan citra sektor pertanian, tetapi juga menggantikan sebagian tugas manusia sehingga lebih efektif dan efisien.

penyampaian informasi kepada petani akan mempercepat pengambilan langkah preventif maupun represif terhadap masalah dalam pengelolaan lahan. Selain itu, informasi yang *real time* dapat membuat penggunaan pupuk, pembasmian hama, dan pengairan menjadi lebih efisien. Dengan demikian, produksi pertanian akan meningkat dengan biaya pengelolaan yang semakin efisien.

Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dan Mitra Kerja

Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo menginisiasi penguatan kelompok ini melalui penyuluhan dan pembentukan korporasi (Koperasi Produsen Sukma Melati Hutabohu). Pada tahun 2015, kelompok ini mulai memproduksi benih dengan sertifikasi dari BPSB Provinsi Gorontalo dan beralih ke produksi pupuk organik pada tahun 2017. Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo memfasilitasi kelompok organik dengan sumur suntik, sementara Dinas Pangan Provinsi Gorontalo memfasilitasi sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) pada tahun 2016.

Dukungan dari berbagai pihak

- a. Bank Indonesia: mendukung kelompok untuk menerapkan Smart Digital Farming.
- b. Perguruan Tinggi: Fakultas Pertanian UNG dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo bermitra dalam edukasi dan pengembangan aplikasi pertanian organik.
- c. Yayasan Anugrah Bangsa: Memproduksi decomposer MA-11 untuk fermentasi pupuk organik.
- d. PT. Pertani (Persero): Menjadi mitra untuk distribusi benih organik.

Penghargaan dan Prestasi

Kelompok Lamuta III menerima berbagai penghargaan antara lain UMKM Award dari Bank Indonesia pada tahun 2021 dan National Bank Indonesia Award pada tahun 2022.

Kelompok Lamuta III berhasil menunjukkan bahwa pertanian organik tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan tetapi juga menguntungkan secara ekonomi. Capaian prestasi yang dihasilkan merupakan bukti keseriusan petani di Gorontalo dalam mengelola pertanian yang inklusif, produktif, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi. Prestasi tersebut juga

merupakan bukti atas keberhasilan koordinasi, sinergi dan kolaborasi yang telah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo.

SDG Goals



Sumber: *SDG Best Practice Repository*

(<https://sdgs.bappenas.go.id/repository/public/9948>)

BAB III

MENGENAL KOTA

GORONTALO DALAM

KONTEKS PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

Kota Gorontalo ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan perdagangan terbesar di Kawasan Teluk Tomini. Gorontalo atau yang dikenal juga dengan nama *Hulontalo* adalah sebuah kota dan ibu kota Provinsi Gorontalo, Sulawesi, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 79,59 km² dan memiliki jumlah penduduk lebih dari 200 ribu jiwa. Kota ini menjadi ibu kota Provinsi Gorontalo yang baru terbentuk pada tanggal 5 Desember 2000 ketika Provinsi Gorontalo dipisahkan dari Sulawesi Utara. Sebagai pemukiman terbesar dan satu-satunya kota di provinsi tersebut, Gorontalo menjadi pusat ekonomi, politik, dan pendidikan. Disamping itu, Kota ini juga merupakan pusat budaya masyarakat Gorontalo dan pernah berada di bawah Kerajaan Islam Gorontalo. Dikarenakan budaya masyarakat Gorontalo yang relatif religius dan relevansinya dengan sejarah Islam, maka kota ini dikenal juga sebagai “Serambi Madinah”.

Keindahan alam Kota Gorontalo juga tidak kalah memikat. Terletak di tepi Teluk Tomini, kota ini menawarkan pemandangan laut yang menakjubkan dan kekayaan biodiversitas laut yang luar biasa. Pantai-pantai seperti Pantai Olele dan Pulau Saronde merupakan destinasi favorit bagi penyelam dan penggemar snorkeling karena keindahan terumbu karang dan kehidupan bawah lautnya. Selain itu, kawasan hutan lindung seperti Taman Nasional Bogani Nani Wartabone menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna

endemik yang dilindungi. Pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya untuk mengembangkan infrastruktur dan fasilitas umum guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi umum diperluas untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi prioritas, dengan pendirian sekolah-sekolah, universitas, dan rumah sakit yang dilengkapi dengan sarana modern. Melalui berbagai upaya ini, Kota Gorontalo tidak hanya mempertahankan warisan budaya dan tradisinya tetapi juga bergerak maju menuju masa depan yang lebih modern dan berdaya saing. Dengan kekayaan budaya, keindahan alam, dan potensi ekonomi yang besar, Kota Gorontalo memiliki segala syarat untuk menjadi salah satu kota terkemuka di Indonesia.

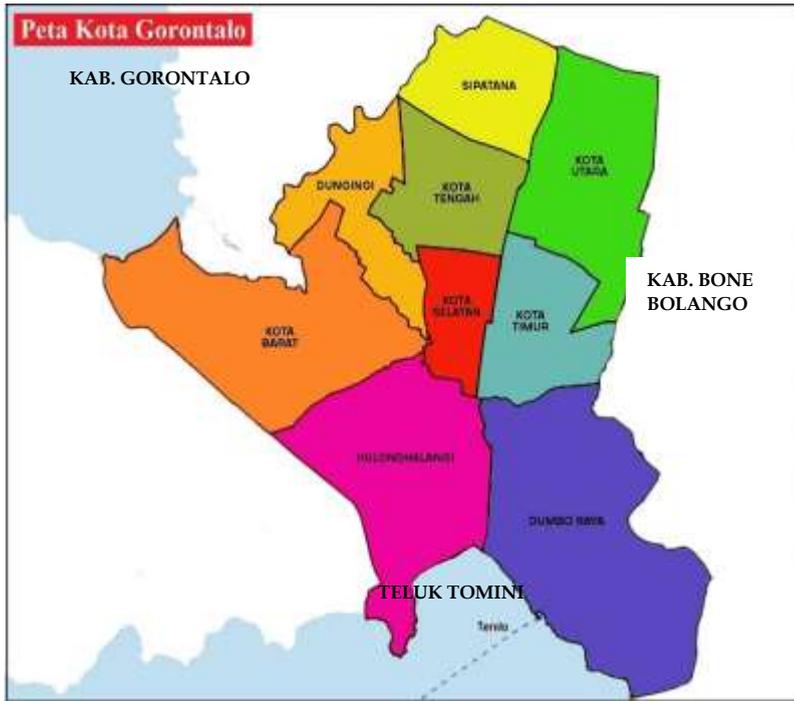
3.1 POTRET GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KOTA GORONTALO

Kota Gorontalo, sebagai ibukota Provinsi Gorontalo, memiliki luas wilayah sebesar 79,59 km², yang setara dengan 0,71 persen dari luas total Provinsi Gorontalo. Terbagi menjadi 9 kecamatan dan 50 kelurahan, kota ini memiliki kecamatan terbesar, yaitu Kota Barat. Secara astronomis, Kota Gorontalo terletak di antara 00 28' 17" - 00 35' 36" lintang utara dan 122 59' 44" - 123 5' 59" bujur timur. Secara geografis, Kota Gorontalo berbatasan dengan Kecamatan Bulango Selatan Bone Bolango di bagian utara, Teluk Tomini di bagian selatan, Sungai Bolango Kabupaten Gorontalo di bagian barat, dan Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango di bagian timur.

Topografi Kota Gorontalo terdiri dari tanah datar yang dilintasi oleh tiga sungai yang berakhir di Teluk Tomini, Pelabuhan Gorontalo. Di bagian selatan, kota ini dikelilingi oleh dua pegunungan berbatu kapur atau pasir. Ketinggiannya bervariasi antara 0 hingga 470 meter di atas permukaan laut. Pesisir pantainya landai dan berpasir. Kota Gorontalo juga dilalui oleh tiga sungai utama, yaitu:

- (1) Sungai Bone sepanjang kurang lebih 4.500 meter yang melintasi Kecamatan Dumbo Raya, Kota Timur, dan Hulonthalangi;
- (2) Sungai Bolango memiliki panjang aliran sekitar 11.000 meter, melewati Kecamatan Sipatana, Duingingi, Kota Barat, Kota Selatan, dan Hulonthalangi; dan

Sungai Tamalate memiliki panjang aliran sekitar 5.000 meter, melewati Kecamatan Kota Utara, Kota Timur, dan Hulonthalangi.



Gambar 6 Peta Kota Gorontalo

Dari segi demografis, Kota Gorontalo memiliki jumlah penduduk sebanyak 204.444 jiwa pada tahun 2023, yang terdiri dari 101.836 jiwa penduduk laki-laki dan 102.608 jiwa penduduk perempuan (BPS, 2023). Tingkat kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk Kota tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 2 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk, 2023

Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Rasio Jenis Kelamin
Kota Barat	25.004	1,01%	100,30%
Dungingi	26.690	0,74%	99,30%

Kota Selatan	20.562	-0,34%	97,75%
Kota Timur	26.973	-0,15%	98,93%
Hulonthalangi	16.935	0,22%	99,93%
Dumbo Raya	19.513	0,48%	100,88%
Kota Utara	21.548	1,98%	99,81%
Kota Tengah	27.461	0,12%	97,49%
Sipatana	19.758	0,41%	99,48%

(Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo*, n.d.)

Berdasarkan data diatas, Kecamatan Kota Tengah menunjukkan populasi terbesar dengan jumlah penduduk mencapai 27.461 jiwa, sementara Kecamatan Hulonthalangi memiliki jumlah penduduk terendah yakni sebanyak 16.935 jiwa. Ketidakmerataan sebaran penduduk di 9 kecamatan di Kota Gorontalo kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti letak geografis, keterbatasan infrastruktur, atau kurangnya peluang kerja di wilayah tertentu yang berdampak pada minat masyarakat untuk tinggal di sana. Dilihat dari rasio jenis kelamin, akumulasi perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Gorontalo pada tahun 2023 adalah sebesar 99,20% dengan rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Dumbo Raya sebesar 100,88%. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Gorontalo serta mengindikasikan masih adanya kesenjangan gender yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk potensi masalah sosial dan kesejahteraan.

Jumlah penduduk Kota Gorontalo paad tahun 2019 tercatat sebanyak 219.399 jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan hingga 0,95% atau sebanyak 198.540 jiwa di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka kematian yang terjadi karena Covid-19. Di tahun 2021, jumlah populasi Kota Gorontalo sedikit mengalami kenaikan sebesar 0.63% atau sebanyak 199.790 jiwa. Memasuki masa pemulihan pasca Covid-19 pada tahun 2021, Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan guna mengendalikan angka kematian seperti menggenjot vaksinasi massal untuk mempercepat imunisasi penduduk. Pemerintah juga memberikan akses ke fasilitas kesehatan dan layanan sosial bagi kelompok yang rentan,

termasuk ibu hamil dan bayi baru lahir, sehingga angka kelahiran dapat didorong dan berdampak pada kembali naiknya jumlah penduduk.

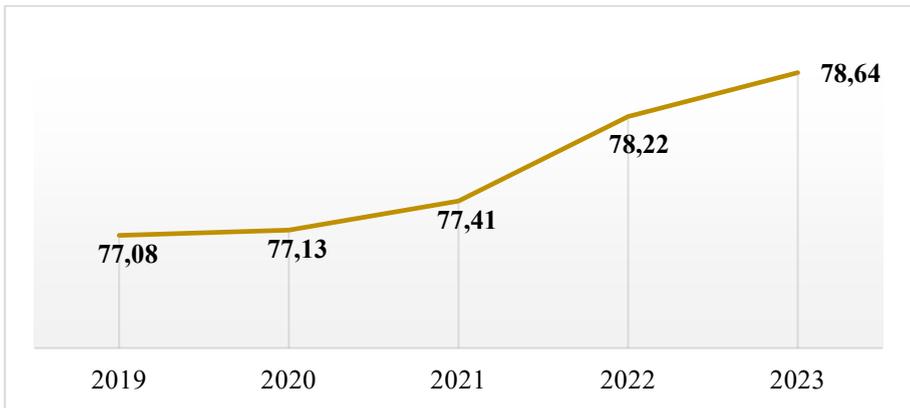
3.2 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KOTA GORONTALO

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu wilayah, termasuk Kota Gorontalo. Diadopsi pada tahun 1990 dalam Program Pembangunan PBB, IPM menjadi tolak ukur yang menyoroti pentingnya manusia dan potensinya dalam proses pembangunan. IPM memungkinkan identifikasi area-area yang memerlukan peningkatan serta evaluasi efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam pengukurannya, IPM menggabungkan tiga dimensi penting dari pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Dimensi kesehatan diukur dari harapan hidup (rata-rata umur saat lahir). Indikator ini mencerminkan kualitas layanan kesehatan, pola hidup sehat, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi harapan hidup masyarakat. Sementara itu, **dimensi pendidikan** diukur dari angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah. Angka melek huruf menggambarkan proporsi penduduk yang mampu membaca dan menulis, sementara angka partisipasi sekolah mengukur proporsi penduduk yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Dimensi ini mencerminkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Sedangkan **dimensi standar hidup layak** diukur dengan pendapatan riil per kapita, yaitu pendapatan rata-rata yang diterima oleh penduduk dalam satu tahun, disesuaikan dengan tingkat inflasi. Indikator ini mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Sejak tahun 2010, IPM Indonesia mengalami peningkatan yang stabil. Namun, pada tahun 2020, pertumbuhan IPM di tingkat nasional menghadapi hambatan akibat pandemi COVID-19 yang memengaruhi Indonesia dan banyak negara lain di dunia. Perlambatan pertumbuhan IPM umumnya disebabkan oleh penurunan laju pertumbuhan harapan hidup dan pendidikan, serta penurunan pendapatan riil per kapita akibat kontraksi ekonomi. Berbeda dengan kondisi nasional, IPM Kota Gorontalo menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. IPM Kota Gorontalo mengalami peningkatan dari 77,08 di tahun 2019, 77,13 di tahun 2020, 77,41 di tahun 2021, 78,22 di

tahun 2022, dan 78,64 di tahun 2023. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Gorontalo selama periode tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan IPM secara menyeluruh. Faktor-faktor seperti pemerataan aksesibilitas layanan kesehatan dan pendidikan di setiap kecamatan dapat memengaruhi capaian IPM Kota Gorontalo. Perlu adanya upaya perbaikan yang lebih fokus pada wilayah yang masih tertinggal.



Gambar 7 Indeks Pembangunan Manusia
(Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo*, n.d.)

Meskipun IPM memberikan gambaran yang lebih luas tentang kesejahteraan manusia, namun tingkat kemiskinan menjadi fokus penting lainnya dalam pemantauan pembangunan suatu wilayah. Pengukuran tingkat kemiskinan bisa memberikan wawasan lebih mendalam tentang ketidaksetaraan dan ketimpangan ekonomi di masyarakat misalnya wilayah dengan IPM yang relatif tinggi masih memiliki kemungkinan untuk menghadapi tingkat kemiskinan yang signifikan terutama jika terdapat ketimpangan distribusi pendapatan yang besar. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga internasional menggunakan berbagai pendekatan untuk mengukur dan menangani masalah kemiskinan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah melalui penggunaan garis kemiskinan atau tingkat pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Sebagai contoh di Kota Gorontalo, IPM telah meningkat dalam beberapa

tahun terakhir menunjukkan kemajuan dalam kesejahteraan masyarakat namun kemiskinan masih menjadi perhatian serius. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin Kota Gorontalo mencapai 11,91 ribu jiwa, meningkat menjadi 12,94 ribu jiwa pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Kota Gorontalo. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya perubahan dinamika ekonomi dan sosial dalam masyarakat Kota Gorontalo yang diakibatkan oleh sejumlah faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, perubahan dalam struktur lapangan pekerjaan, dan dampak lain dari pandemi COVID-19. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu berupaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kemiskinan melalui langkah-langkah strategis yang lebih efektif, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, penciptaan lapangan kerja yang layak, dan peningkatan bantuan sosial yang terarah.

Tabel 3 Indikator Kemiskinan Tahun 2019-2023

Tahun	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penduduk miskin (ribu)	11,91	12,46	12,94	12,67	12,62
Persentase penduduk miskin (P_0)	5,45	5,59	5,93	5,73	5,64
Indeks kedalaman kemiskinan (P_1)	0,68	0,61	0,79	0,82	0,62
Indeks keparahan kemiskinan (P_2)	0,13	0,10	0,22	0,15	0,11
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	520.095	569.538	598.363	643.531	697.650

(Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo*, n.d.)

Penggunaan IPM dan indikator kemiskinan secara bersama-sama dapat memberikan pandangan yang lebih lengkap tentang status dan distribusi kesejahteraan masyarakat. Kedua indikator ini penting digunakan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang rentan dan memastikan bahwa

kebijakan pembangunan yang diimplementasikan oleh pemerintah benar-benar memihak kepada masyarakat dalam kelompok tersebut. Dengan demikian, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengarahkan sumber daya dan program dengan lebih efektif untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3.3 KEWENANGAN WILAYAH DALAM PENCAPAIAN SDGS

Pemetaan indikator SDGs berdasarkan kewenangan wilayah – nasional, provinsi, kabupaten/kota – merupakan langkah penting untuk memastikan proses implementasi agenda pembangunan yang efektif dan efisien. Pemetaan ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi tanggung jawab dan peran masing-masing tingkatan pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa upaya pembangunan berkelanjutan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks spesifik dari setiap wilayah. Dalam implementasinya, setiap daerah memiliki jumlah indikator yang berbeda-beda sesuai dengan kewenangan dan kondisi wilayahnya masing-masing.

Berikut beberapa tujuan dilakukannya pemetaan indikator SDGs berdasarkan kewenangan wilayah:

1. Penyelarasan kebijakan dan program

Dengan pemetaan yang jelas, kebijakan dan program pembangunan dapat lebih mudah diselaraskan di berbagai tingkatan pemerintahan. Misalnya, indikator yang menjadi kewenangan nasional dapat difokuskan pada isu-isu yang memerlukan koordinasi lintas wilayah, sementara indikator pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat disesuaikan dengan kondisi lokal yang lebih spesifik.

2. Efektivitas dan efisiensi sumber daya

Pemetaan indikator membantu dalam distribusi sumber daya yang lebih efisien dan efektif. Dengan mengetahui indikator mana yang menjadi tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan, alokasi anggaran dan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Hal ini juga dapat menghindari terjadinya duplikasi program/kegiatan dan memastikan bahwa semua aspek pembangunan mendapatkan perhatian yang cukup.

3. Penguatan kapasitas lokal

Pemetaan indikator berdasarkan kewenangan wilayah dapat mendorong peningkatan kapasitas di tingkat lokal. Pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam membangun kapasitas internal mereka untuk mengelola dan melaporkan pencapaian SDGs sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mengambil keputusan yang tepat dan berbasis data.

4. Pemantauan dan evaluasi yang lebih akurat

Dengan pemetaan yang jelas, proses pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Indikator yang sudah ditetapkan memungkinkan pelacakan kemajuan yang lebih akurat dan mendetail, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal ini sangat penting untuk menilai efektivitas program pembangunan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

5. Penyesuaian dengan konteks lokal

Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan yang unik. Pemetaan indikator memungkinkan penyesuaian program SDGs dengan konteks lokal, sehingga program yang dijalankan lebih relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, indikator yang relevan untuk daerah perkotaan mungkin berbeda dengan indikator yang relevan untuk daerah pedesaan atau terpencil.

6. Transparansi dan akuntabilitas

Pemetaan indikator berdasarkan kewenangan wilayah juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan SDGs. Dengan pembagian tugas yang jelas, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat lebih mudah memantau siapa yang bertanggung jawab atas pencapaian indikator tertentu, sehingga proses akuntabilitas menjadi lebih kuat.

Pemetaan indikator SDGs berdasarkan kewenangan wilayah mencerminkan komitmen kolektif dari seluruh tingkatan pemerintahan untuk bekerja sama menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Komitmen ini penting untuk membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui pendekatan ini, pemerintah akan lebih mudah untuk mengidentifikasi peran dan tanggung

jawab masing-masing tingkatan pemerintahan dalam upaya mencapai target-target SDGs. Sinergi dan koordinasi dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan juga diharapkan akan terlaksana dengan lebih baik. Dengan demikian, upaya kolektif ini dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, membawa manfaat nyata bagi masyarakat, dan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berdasarkan Metadata SDGs Edisi II, di Indonesia terdapat 289 indikator SDGs dengan 124 target sebagai basis *mainstream* dalam agenda pembangunan nasional. Dari 289 indikator tersebut, agregasi data dari 78 indikator masuk pada wilayah administrasi Provinsi, 107 indikator pada wilayah administrasi Kota, 84 indikator pada level nasional, dan 20 indikator lainnya memiliki agregasi data bukan berdasarkan wilayah. Perbedaan kewenangan dan kondisi wilayah menjadikan setiap daerah memiliki jumlah indikator yang berbeda-beda. Sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya, wilayah Kota memiliki peran yang signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, memahami dan mengelola indikator SDGs khusus untuk wilayah kota menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang lebih responsif dan inklusif. Adapun daftar indikator yang menjadi kewenangan wilayah Kota dan dikelompokkan dalam empat pilar pembangunan SDGs sebagai berikut:

3.3.1 Pilar Pembangunan Sosial

Pilar Pembangunan Sosial merupakan satu dari empat pilar utama SDGs di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Tujuan-tujuan yang tercakup dalam pilar ini dapat tercapai melalui komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak sehingga membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Pilar pembangunan ini meliputi aspek-aspek kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta perlindungan sosial. Dari 87 total indikator pada Pilar Pembangunan Sosial, sebanyak 43 indikator merupakan bagian dari kewenangan wilayah administrasi Kota yang tersebar di lima tujuan utama sebagai berikut:

Tujuan 1 – Mengentaskan Kemiskinan

Tujuan pembangunan yang pertama adalah menghapus kemiskinan yang menjadi landasan utama bagi upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa indikator telah ditetapkan sebagai penilaian kinerja dalam upaya mengatasi kemiskinan. Pertama, tingkat kemiskinan ekstrim (indikator 1.1.1) menjadi parameter kritis untuk mengukur seberapa jauh kemiskinan yang sangat parah dapat diatasi. Selanjutnya, indikator 1.2.1 dan 1.2.2 memperhatikan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dengan memperhatikan faktor jenis kelamin dan kelompok umur. Hal ini penting karena kemiskinan dapat mempengaruhi kelompok-kelompok tertentu dengan cara yang berbeda, misalnya, dampak kemiskinan terhadap anak-anak mungkin berbeda dengan dampaknya terhadap lansia.

Masih dalam kaitannya dengan kemiskinan, indikator 1.3.1, 1.3.1.(a) dan 1.3.1.(b) menyoroti proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, dengan mempertimbangkan jenis kelamin dan kategori kelompok yang rentan seperti anak-anak berkebutuhan khusus, lansia, dan penyandang disabilitas. Hal ini menegaskan komitmen untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Disamping kesehatan, akses terhadap pelayanan dasar (indikator 1.4.1) menjadi fokus untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan lain-lain. Sementara itu, indikator 1.4.2 menyoroti pentingnya kepemilikan tanah yang sah yang merupakan aset kunci dalam upaya mengurangi kemiskinan dan membangun keberlanjutan ekonomi.

Tanpa disadari, kemiskinan saat ini juga banyak tercipta sebagai dampak terjadinya sebuah bencana. Oleh karena itu, indikator 1.5.1 dan 1.5.4 menjadi relevan dalam menghadapi ancaman bencana alam yang akan mempengaruhi status kemiskinan masyarakat. Indikator 1.5.1 mengukur dampak bencana dengan memperhitungkan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak per 100.000 orang, sementara indikator 1.5.4 mengevaluasi upaya pemerintah daerah dalam mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana yang sesuai dengan strategi nasional. Hal ini penting untuk meminimalkan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana di masa depan.

Tujuan 2 – Mengakhiri Kelaparan

Fokus utama pada tujuan ini adalah mengakhiri kelaparan yang dicapai melalui dua dimensi utama yaitu kecukupan gizi dan akses pangan. Kondisi gizi masyarakat diukur melalui indikator 2.2.1 terkait prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Indikator ini sangat penting karena stunting dapat menjadi permasalahan utama dari kekurangan gizi kronis pada anak-anak. Angka stunting yang tinggi menandakan masalah gizi yang serius dalam suatu populasi, yang bisa berdampak pada perkembangan fisik, kognitif, dan produktivitas di masa depan. Selain itu indikator prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (2.2.2) juga memberikan gambaran tentang keadaan gizi dalam suatu populasi, terutama mengenai kekurangan gizi akut yang bisa menjadi indikator krisis gizi yang sedang berlangsung.

Pada dimensi akses pangan, indikator 2.4.1.(a) yang mengukur proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan menyoroti pentingnya pembangunan pertanian yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya untuk menyediakan sumber makanan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat. Konsep pertanian berkelanjutan tidak hanya mencakup aspek produksi, tetapi juga melibatkan pertimbangan terhadap keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penetapan lahan pertanian sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan mencerminkan komitmen untuk menjaga produktivitas tanah secara jangka panjang, memperhatikan keberlanjutan ekosistem, dan mempromosikan praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan.

Indeks Orientasi Pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah pada indikator 2.a.1 juga digunakan untuk mengetahui seberapa besar anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk sektor pertanian. Anggaran yang memadai dalam sektor pertanian tentunya dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sistem pangan. Dengan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk sektor pertanian, pemerintah dapat mendukung investasi dalam infrastruktur pertanian, pelatihan petani, penelitian dan inovasi teknologi, serta layanan peningkatan kapasitas, semua ini merupakan langkah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan memastikan ketahanan pangan dalam jangka panjang.

Disamping ketersediaan anggaran, akses pada pangan berkualitas juga diukur melalui Indikator Anomali Harga Pangan (2.c.1). Indikator ini memberikan informasi tentang fluktuasi harga pangan yang dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap makanan. Perubahan harga pangan yang tiba-tiba atau tidak terduga dapat memperburuk kerentanan pangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Ketidakstabilan harga pangan bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti bencana alam, perubahan iklim, ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, serta faktor-faktor ekonomi global. Dengan memantau indikator ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merespons dengan kebijakan yang tepat waktu untuk mengurangi dampak negatif dari fluktuasi harga pangan, seperti program bantuan pangan, subsidi, atau insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pangan dalam skala lokal. Dengan demikian, upaya untuk mengatasi anomali harga pangan merupakan langkah penting dalam memastikan akses pangan yang stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Tujuan 3 – Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 berfokus pada upaya untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua usia. Indikator utama untuk mencapai tujuan ini meliputi berbagai aspek kesehatan masyarakat. Angka Kematian Ibu (AKI) pada indikator 3.1.1 adalah salah satu indikator utama dalam mengukur kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu. AKI mengukur jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan, persalinan, atau masa nifas. Penurunan angka kematian ibu adalah tujuan utama karena angka ini mencerminkan kualitas layanan kesehatan maternal dan akses terhadap perawatan medis yang memadai. Tingginya AKI menunjukkan adanya keterbatasan dalam layanan kesehatan seperti kurangnya tenaga kesehatan terlatih, akses yang sulit ke fasilitas kesehatan, atau rendahnya pengetahuan ibu tentang kesehatan reproduksi. Selanjutnya, proporsi perempuan yang pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih atau di fasilitas kesehatan (indikator 3.1.2) merupakan indikator penting yang menggambarkan akses perempuan terhadap layanan persalinan yang aman. Indikator ini menunjukkan seberapa banyak perempuan mendapatkan perawatan oleh tenaga kesehatan profesional seperti bidan, dokter, atau perawat di lingkungan yang aman dan terkontrol. Peningkatan

proporsi ini diharapkan dapat mengurangi risiko komplikasi selama persalinan dan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi.

Indikator 3.2.1 terkait Angka Kematian Balita (AKBa) dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kematian pada anak-anak di bawah usia lima tahun dan bayi di bawah satu tahun. Tingginya AKBa dan AKB mencerminkan masalah kesehatan yang serius seperti malnutrisi, penyakit infeksi, atau kurangnya akses ke layanan kesehatan dasar. Upaya untuk mengurangi angka ini termasuk meningkatkan imunisasi, memastikan akses air bersih dan sanitasi, serta menyediakan perawatan kesehatan dasar yang memadai. Selain itu, Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup pada indikator 3.2.2 mengukur jumlah kematian bayi yang terjadi dalam 28 hari pertama kehidupan. Periode neonatal adalah masa yang sangat rentan karena bayi baru lahir sangat rentan terhadap infeksi, kelainan bawaan, atau komplikasi persalinan. Penurunan AKN memerlukan intervensi yang tepat seperti perawatan antenatal yang baik, persalinan yang aman, serta perawatan pascanatal yang intensif dan tepat waktu.

Pengukuran tingkat kesehatan masyarakat juga dilakukan melalui berbagai indikator penting yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi penyakit menular dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Salah satu indikator tersebut adalah Kejadian Malaria per 1000 orang (3.3.3) yang digunakan untuk mengukur jumlah kasus malaria di dalam populasi. Tujuan utama dari indikator ini adalah mengurangi insiden malaria melalui program vaksinasi, pemberian obat, serta peningkatan kesadaran dan pencegahan. Demikian pula dengan indikator 3.3.4 yang mengukur insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk dengan tujuan mengendalikan penyebarannya melalui vaksinasi yang efektif dan intervensi kesehatan lainnya. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan, seperti filariasis dan kusta, (indikator 3.3.5) juga merupakan indikator penting yang harus diperhatikan. Penyakit tropis yang terabaikan sering kali menyerang komunitas yang paling rentan dan miskin sehingga upaya eliminasi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terdampak.

Selain upaya pengendalian penyakit, gaya hidup juga menjadi fokus dalam pengukuran kesehatan masyarakat. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (3.4.1.(a)) dan usia ≥ 15 tahun (3.a.1), prevalensi tekanan darah

tinggi (3.4.1.(b)), dan prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun (3.4.1.(c)) adalah indikator penting untuk mengurangi risiko penyakit terkait gaya hidup seperti penyakit jantung dan stroke. Pengurangan prevalensi merokok di kalangan remaja, misalnya, dapat mencegah banyak penyakit kronis di masa depan. Mengendalikan prevalensi tekanan darah tinggi dan obesitas melalui program pendidikan kesehatan, promosi gaya hidup sehat, dan intervensi medis adalah langkah-langkah kunci untuk mencegah komplikasi kesehatan serius.

Peningkatan kesehatan masyarakat tentunya tidak lepas dari ketersediaan akses terhadap layanan dan fasilitas kesehatan. Jumlah orang yang mengakses layanan pascarehabilitasi (3.5.1.(b)), khususnya untuk penyalahgunaan narkoba, menjadi indikator penting yang mengindikasikan bahwa semakin banyak individu yang mendapatkan bantuan untuk pemulihan pasca penyalahgunaan zat atau kondisi medis serius lainnya. Peningkatan akses ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem layanan kesehatan yang mendukung pemulihan jangka panjang dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Cakupan pelayanan kesehatan esensial (3.8.1) dan unmet need pelayanan kesehatan (3.8.1.(a)) menjadi indikator lain yang mengukur sejauh mana masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan. Indikator ini membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam akses layanan kesehatan esensial, sehingga pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi.

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah indikator penting lainnya yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Hasil pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan perlindungan kesehatan melalui program asuransi kesehatan nasional. JKN memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat terhadap biaya kesehatan sehingga mendorong akses yang lebih luas ke layanan kesehatan yang dibutuhkan. Terakhir, kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan per 1000 penduduk (3.c.1) adalah indikator yang mengukur ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan, seperti dokter dan perawat, di seluruh wilayah. Pengukuran pada indikator ini penting dilakukan karena untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan.

Tujuan 4 – Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 dengan fokus pada isu pendidikan merupakan salah satu target utama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di berbagai jenjang. Indikator utama yang diukur meliputi tingkat penyelesaian pendidikan pada jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat (4.1.2*), serta angka anak yang tidak bersekolah pada jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat (4.1.2.(a)). Selain itu, partisipasi dalam pembelajaran terorganisir satu tahun sebelum usia sekolah dasar dianalisis menurut jenis kelamin (4.2.2*), dan tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan serta pelatihan formal dan nonformal selama 12 bulan terakhir juga dikaji berdasarkan jenis kelamin (4.3.1*). Dalam lingkup pendidikan tinggi, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi menjadi salah satu indikator penting (4.3.1.(a)). Keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diukur pada remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) untuk mengukur kesiapan dalam menghadapi perkembangan teknologi (4.4.1.(a)).

Indikator lainnya adalah rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, dan SMA/MA/ sederajat, serta rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di perguruan tinggi yang dianalisis berdasarkan kategori perempuan/ laki-laki, pedesaan/ perkotaan, kuintil terbawah/ teratas, dan disabilitas/ tanpa disabilitas (4.5.1*). Terakhir, persentase angka melek aksara pada penduduk berusia ≥ 15 tahun menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan dasar literasi masyarakat (4.6.1.(a)). Semua indikator ini secara keseluruhan mencerminkan upaya yang komprehensif untuk mencapai pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata bagi semua lapisan masyarakat.

Tujuan 5 – Kesetaraan Gender

Tujuan ke lima dari agenda pembangunan berkelanjutan adalah untuk mencapai kesetaraan gender. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan pencapaian target SDGs pada tujuan ini yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, indikator 5.5.1 mengukur proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik yang merupakan elemen kunci dalam memastikan representasi gender yang seimbang di lembaga legislatif. Kedua, indikator 5.5.2 mengukur

proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial. Ini menyoroti keterlibatan perempuan dalam posisi kepemimpinan di sektor ekonomi, yang esensial untuk mencapai kesetaraan gender dalam dunia kerja. Selanjutnya, indikator 5.6.2 menilai regulasi yang menjamin akses setara bagi perempuan dan laki-laki terhadap pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. Akses ini sangat penting untuk memberdayakan perempuan dalam aspek kesehatan dan hak-hak reproduksi mereka. Terakhir, indikator 5.b.1 mengukur proporsi individu yang menguasai atau memiliki telepon genggam. Indikator ini relevan dalam konteks kesetaraan gender karena akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan peluang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial bagi perempuan.

3.3.2 Pilar Pembangunan Lingkungan

Pilar Pembangunan Lingkungan mencakup aspek-aspek perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim. Implementasi pilar ini sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, keberlanjutan sumber daya alam, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan, upaya di bidang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dari 77 total indikator pada Pilar Pembangunan Lingkungan, sebanyak 26 indikator merupakan bagian dari kewenangan wilayah administrasi Kota yang tersebar di enam tujuan utama.

Tujuan 6 – Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 SDGs memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai aspek pengelolaan air bersih dan sanitasi, serta menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan tersebut. Upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk mencapai target-target ini dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pemerataan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak merupakan salah satu dari SDGs untuk memastikan akses universal dan berkelanjutan terhadap air bersih dan sanitasi bagi semua orang. Berdasarkan indikator 6.1.1, persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman menjadi tolok ukur penting dalam menilai kemajuan di bidang ini. Layanan air minum yang dikelola

secara aman mencakup air yang terlindungi dari kontaminasi kimia, mikrobiologis, dan fisik, serta tersedia secara berkelanjutan dan memadai untuk kebutuhan sehari-hari. Air minum yang aman merupakan prasyarat dasar bagi kesehatan manusia dan pencegahan berbagai penyakit.

Selain itu, indikator 6.2.1 menyoroiti persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun. Ketersediaan sanitasi yang memadai sangat penting untuk mencegah penyakit menular dan menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sanitasi yang memadai tidak hanya mencakup akses terhadap toilet yang aman tetapi juga mencakup fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun. Praktik cuci tangan yang baik adalah salah satu langkah sederhana namun efektif dalam mencegah penyebaran penyakit menular termasuk di antaranya diare, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi kulit. Disamping itu, ntuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang optimal, ketersediaan sanitasi yang layak juga berperan penting dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas terkait penyakit yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak higienis. Sebagai contoh, penyakit diare yang sering terjadi karena konsumsi air dan makanan yang terkontaminasi dapat dicegah dengan akses yang memadai terhadap sanitasi dan praktik hygiene yang baik.

Di sektor industri, indikator 6.3.1(a) mengukur persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman yang mencerminkan upaya pengelolaan limbah untuk mengurangi pencemaran air dan menjaga kualitas lingkungan. Pengelolaan sumber daya air juga dinilai melalui indikator 6.4.2(a) dan 6.4.2(b), yang masing-masing mengukur proporsi pengambilan air baku dari air permukaan dan air tanah terhadap ketersediaannya. Pengelolaan yang efisien dari sumber daya air ini penting untuk memastikan ketersediaan air bagi berbagai kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri, serta untuk menjaga ekosistem yang sehat.

Tujuan 11 – Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuan ini menguraikan berbagai indikator yang relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan pada pembangunan kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Pertama-tama, rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk (11.3.1a) menjadi fokus awal yang menggambarkan sejauh mana kota-kota dapat menjaga keseimbangan antara perkembangan fisik dan populasi. Selanjutnya, total pengeluaran per

kapita yang diperuntukan untuk preservasi dan konservasi warisan budaya dan alam (11.4.1a) menjadi pertimbangan penting lainnya yang menyoroti komitmen keuangan terhadap pelestarian lingkungan dan warisan budaya. Analisis juga mencakup jumlah korban dan kerugian akibat bencana (11.5.1, 11.5.2), yang menggarisbawahi urgensi perlindungan dan mitigasi risiko di wilayah perkotaan.

Selain itu, aspek manajemen sampah (11.6.1a, 11.6.1b) dan kualitas udara (11.6.2a, 11.6.2b) menjadi fokus dalam mengevaluasi keberlanjutan lingkungan perkotaan. Penggunaan ruang terbuka perkotaan (11.7.1a) juga diukur untuk menentukan aksesibilitas dan keberlanjutan lingkungan dalam konteks urbanisasi. Selanjutnya, strategi penanggulangan bencana yang selaras dengan rencana nasional (11.b.2*) menjadi esensial, menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan nasional dalam mitigasi risiko bencana. Akhirnya, implementasi peraturan bangunan berkelanjutan dan berketahanan (11.c.1a) menjadi penekanan akhir, menegaskan perlunya kebijakan lokal yang adaptif terhadap tantangan lingkungan dan sosial dalam konteks perkotaan. Melalui analisis multidimensional ini, dapat dilihat kompleksitas dan tantangan yang harus dihadapi dalam membangun kota dan pemukiman yang berkelanjutan secara holistik.

Tabel 12 – Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Tujuan 12 SDG mengeksplorasi paradigma konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab yang menggarisbawahi perlunya keselarasan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Indikator 12.3.1 menggambarkan permasalahan yang signifikan terkait pemborosan makanan. Saat ini, jumlah sisa makanan yang terbuang menjadi isu global yang membutuhkan solusi terpadu dari berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang mendorong perubahan perilaku konsumsi serta sistem manajemen persediaan makanan yang lebih efisien. Sementara itu, fokus pada pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri, seperti yang tercermin dalam indikator 12.4.1 menyoroti upaya perlunya mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungan. Langkah-langkah ini harus diimbangi dengan pemahaman mendalam tentang potensi risiko dan alternatif yang tersedia, serta peran pemerintah dalam mengawasi dan mengatur kegiatan industri.

Di sisi lain, data tentang limbah berbahaya dan beracun (B3) menunjukkan pentingnya penanganan limbah yang tepat, termasuk pengelolaan dan pemrosesan yang aman. Indikator 12.4.2 memberikan informasi penting tentang tanggung jawab perusahaan dalam mengelola limbah yang dihasilkan, serta kemampuan sistem penanganan limbah publik dalam memprosesnya. Di samping itu, upaya daur ulang juga menjadi fokus dalam pencapaian tujuan 12 SDG, seperti yang tercermin melalui indikator 12.5.1 yang mengukur jumlah timbunan sampah yang berhasil didaur ulang. Daur ulang menjadi salah satu solusi penting dalam mengurangi dampak lingkungan dari limbah dan mempromosikan pemanfaatan kembali sumber daya secara efisien. Selanjutnya, aspek transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam praktik bisnis yang berkelanjutan ditekankan melalui indikator 12.6.1 yang mengukur jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. Langkah ini tidak hanya membangun kepercayaan konsumen tetapi juga memicu persaingan yang sehat dalam memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan. Tidak hanya sektor swasta, tetapi juga sektor publik memiliki peran penting dalam mencapai tujuan 12 SDG, seperti yang tercermin dalam indikator 12.8.1 (b) yang menyoroti implementasi Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif.

Tujuan 12 juga mencakup aspek pariwisata dimana dalam upaya untuk mempromosikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, indikator 12.b.1 mengevaluasi jumlah lokasi yang menerapkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Indikator ini menyoroti pentingnya pariwisata yang bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial di destinasi pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perlu untuk digarisbawahi bahwa pengelolaan secara hati-hati terhadap dampak lingkungan dan sosial pariwisata serta partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan pariwisata adalah kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata berkontribusi secara positif terhadap pencapaian tujuan SDGs secara keseluruhan.

Tujuan 13 – Penanganan Perubahan Iklim

Fokus dari tujuan pembangunan berkelanjutan Tujuan 13 adalah penanganan perubahan iklim dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap

ancaman bencana. Tujuan ini mencakup dua indikator kunci, yaitu jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang (13.1.1), serta persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana (13.1.3). Dalam konteks jumlah korban, penilaian per 100.000 orang memberikan gambaran yang lebih terukur terhadap dampak bencana terhadap populasi. Analisis mendalam terhadap angka ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas sistem peringatan dini, respons bencana, dan kapasitas penyelamatan yang tersedia di suatu wilayah. Sementara itu, persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional menyoroti pentingnya kerangka kerja yang terkoordinasi dalam menghadapi ancaman bencana. Koordinasi antara level pemerintahan daerah dengan nasional diperlukan untuk memastikan respons yang efisien dan terkoordinasi dalam mengelola risiko bencana. Oleh karena itu, pemantauan terhadap kedua indikator ini menjadi krusial dalam mengevaluasi kemajuan dan keefektifan upaya penanganan perubahan iklim serta mitigasi bencana secara keseluruhan.

Tujuan 14 – Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 – Ekosistem Daratan

Pembahasan mengenai Tujuan 14 (Ekosistem Lautan) dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan) merupakan aspek penting dalam upaya pelestarian lingkungan yang diakui secara global. Namun, dalam konteks wilayah administrasi Kota, terdapat kekurangan dalam ketersediaan data indikator terhadap kedua ekosistem tersebut. Dalam hal ini, ketidakterediaan data yang terperinci tentunya dapat menghambat upaya pemantauan, evaluasi, dan perencanaan tindakan konservasi yang efektif di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengumpulan dan pemetaan data yang lebih terperinci, termasuk penerapan teknologi dan metodologi yang sesuai untuk melihat kerentanan ekosistem laut dan daratan di wilayah Kota.

3.3.3 Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar Pembangunan Ekonomi mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Implementasi pilar ini penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan, mendorong terciptanya lapangan kerja yang layak, meningkatkan produktivitas, dan memastikan adanya akses yang adil terhadap sumber daya

ekonomi bagi semua. Disamping itu, pilar ini juga memiliki peran yang signifikan dalam mendorong inovasi yang dapat memperkuat infrastruktur ekonomi secara menyeluruh. Dalam konteks disagregasi data berdasarkan wilayah, pilar ini mencakup 23 indikator yang tersebar di lima tujuan dan merupakan bagian dari kewenangan wilayah administrasi Kota.

Tujuan 7 – Energi Bersih dan Terjangkau

Dalam konteks pencapaian SDGs Tujuan 7 ketersediaan data dan informasi terkait rasio elektrifikasi (indikator 7.1.1), jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga (indikator 7.1.2.(a)), dan rasio penggunaan gas rumah tangga (indikator 7.1.2.(b)) menjadi indikator penting dalam mengukur progress pencapaian target SDGs. Rasio elektrifikasi mencerminkan persentase populasi yang memiliki akses terhadap Listrik dan menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi aksesibilitas energi listrik. Penyediaan jaringan gas untuk rumah tangga, seperti yang tercermin dalam jumlah sambungan gas, dan rasio penggunaan gas rumah tangga, menyoroti adopsi energi alternatif yang lebih bersih dan potensial untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Analisis terhadap ketiga indikator ini memberikan gambaran holistik tentang kemajuan dalam memperluas akses energi bersih serta pergeseran menuju penggunaan sumber energi yang lebih berkelanjutan dalam konteks rumah tangga. Dengan memantau dan mengevaluasi data ini secara teratur, kebijakan energi dapat diarahkan untuk mempromosikan penggunaan energi bersih dan terbarukan yang lebih luas serta meningkatkan aksesibilitas terhadap energi yang terjangkau bagi masyarakat.

Tujuan 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk memahami hubungan antara pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Tujuan 8 SDGs melakukan pengukuran terhadap laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita serta pertumbuhan PDB per tenaga kerja. Melalui indikator 8.1.1 yang mengukur laju pertumbuhan PDB per kapita, dapat dilakukan evaluasi terhadap tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk suatu negara. PDB per kapita menjadi indikator penting dalam menilai efisiensi alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan dalam suatu ekonomi. PDB per kapita (8.1.1.(a)) bukan hanya mencerminkan kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, tetapi juga menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya serta distribusi

pendapatan yang merata di antara masyarakat. Kenaikan nilai PDB per kapita seringkali dikaitkan dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Lebih lanjut, indikator 8.2.1, yang menghitung laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja atau tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja cenderung lebih berkelanjutan karena mencerminkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia dan teknologi. Melalui peningkatan produktivitas, perusahaan mampu meningkatkan output, pendapatan dan peluang untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas. Dengan memperhatikan ketiga indikator tersebut dapat dipahami bahwa adanya pekerjaan yang layak, upah yang layak, kondisi kerja yang aman, serta peluang untuk pengembangan karir dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Tujuan 9 – Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang mantap merupakan landasan vital bagi kemajuan ekonomi suatu negara. Dalam konteks SDGs Tujuan 9 yang menekankan pada Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, pembangunan infrastruktur, seperti kondisi mantap jalan nasional (9.1.1.(a)) menjadi aspek utama yang disorot. Menjaga kondisi mantap jalan nasional menjadi penting karena jalan nasional merupakan tulang punggung sistem transportasi yang mendukung aliran barang dan jasa di seluruh negeri. Selain itu, melalui data jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi (9.1.2*), dapat divalusi efektivitas dari berbagai moda transportasi yang ada dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat serta distribusi barang secara efisien. Data ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tren transportasi yang sedang berlangsung, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam sektor transportasi. Tidak hanya infrastruktur transportasi, di sisi lain, pertumbuhan sektor industri manufaktur juga menjadi penggerak utama dalam perekonomian. Data laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (9.2.1.(a)) dapat digunakan untuk menilai kesehatan sektor ini dan sejauh mana kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pengelolaan pertumbuhan industri

manufaktur yang berkelanjutan dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip SDGs.

Tujuan 10 – Berkurangnya Kesenjangan

Dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Tujuan 10, sejumlah indikator seperti ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat perlu dipahami dan diatasi dengan baik. Indikator 10.1.1(a) memberikan gambaran yang penting tentang tingkat kemiskinan nasional berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Tidak hanya mengidentifikasi tingkat kemiskinan, namun pengukuran pada indikator ini juga membantu dalam memahami bagaimana ketidaksetaraan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis. Selanjutnya, indikator 10.1.1(b) dan (c) mengukur status desa tertinggal dan desa mandiri. Desa-desa yang tertinggal seringkali menghadapi tantangan akses terhadap sumber daya dan layanan dasar, sementara desa mandiri menunjukkan potensi untuk mengurangi kesenjangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif. Indikator 10.1.1(f) memperlihatkan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal yang menyoroti perlunya fokus yang lebih besar pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Selanjutnya, indikator 10.2.1* memungkinkan untuk mengevaluasi proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan dengan memperhitungkan jenis kelamin dan penyandang difabilitas. Indikator ini memberikan wawasan yang lebih khusus tentang kelompok-kelompok rentan yang mungkin terpinggirkan dalam upaya mengurangi kesenjangan.

Selanjutnya, indikator 10.3.1(d) mencatat jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam periode 12 bulan terakhir berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kesenjangan dalam masyarakat. Sementara itu, indikator 10.4.1(b) menyoroti proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja dan keluarga mereka. Dengan memperhatikan berbagai indikator ini, langkah-langkah kebijakan yang

holistik dan terarah dapat dirancang dan diimplementasikan untuk mengatasi akar penyebab ketimpangan dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat.

Tujuan 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Pembahasan mengenai indikator-indikator terkait dengan Tujuan 17 menunjukkan upaya yang signifikan dalam mewujudkan kemitraan yang efektif untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan. Salah satu indikator utama yaitu 17.1.1(a) yang mengukur rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi cerminan dari kemampuan suatu negara dalam memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Peningkatan rasio ini umumnya menunjukkan efisiensi dan kepatuhan yang lebih baik dalam pengumpulan pajak, yang pada gilirannya dapat mengarah pada peningkatan sumber daya yang tersedia untuk investasi dalam sektor-sektor kunci pembangunan.

Selanjutnya, indikator 17.1.2 memperlihatkan proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. Capaian pada indikator ini merupakan ukuran yang penting untuk mengevaluasi seberapa besar negara mampu membiayai kegiatan pembangunan mereka secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau sumber daya luar. Keberhasilan dalam meningkatkan proporsi ini menandakan kemandirian fiskal yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kedaulatan ekonomi dan kebijakan pembangunan. Selain itu, indikator 17.17.1(a) dan 17.17.1(b) membahas tentang jumlah dokumen Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema KPBU. Kerjasama ini merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah dalam melibatkan sektor swasta untuk menyediakan infrastruktur dan layanan publik. Peningkatan jumlah proyek dan nilai investasi proyek KPBU, seperti yang dicatat dalam indikator 17.17.1(c), menunjukkan kepercayaan dan minat yang meningkat dari pihak swasta dalam berkolaborasi dengan pemerintah, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang lebih luas.

Selain itu, Tujuan 17 juga mencakup indikator 17.19.2(b) yang menyoroti pentingnya data registrasi kelahiran dan kematian dalam mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Data ini menjadi dasar untuk pemetaan populasi dan analisis demografi yang kritis dalam merancang program-program pembangunan yang tepat sasaran

dan efektif. Melalui menerapkan prinsip-prinsip kemitraan yang kokoh dan memperkuat sistem pemantauan yang handal, pemerintah dapat mengarahkan proses pembangunan masyarakat menuju arah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan jangka panjang.

3.3.4 Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola mencakup aspek-aspek hukum, tata kelola yang baik, serta penguatan institusi. Implementasi pilar ini penting dalam memastikan terciptanya sistem hukum yang adil dan inklusif, tata kelola yang efisien dan transparan, serta lembaga-lembaga yang akuntabel. Pemenuhan target pada pilar ini dapat membantu terciptanya perdamaian dan stabilitas sosial serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Dalam konteks disagregasi data berdasarkan wilayah, pilar ini mencakup 15 indikator yang masuk dalam wilayah administrasi Kota dan tercakup di dalam satu tujuan pembangunan.

Tujuan 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Dalam mengupayakan pencapaian Tujuan 16 yang menitikberatkan pada Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, berbagai indikator penting telah dirumuskan untuk mengukur kemajuan dan efektivitas kebijakan. Salah satu indikator yang relevan adalah 16.1.1(a), yang mengukur jumlah kasus kejahatan pembunuhan dalam satu tahun terakhir. Indikator ini memberikan gambaran awal tentang tingkat keamanan masyarakat dan efektivitas penegakan hukum. Dalam masyarakat yang damai, penurunan jumlah kasus kejahatan pembunuhan cenderung menjadi indikasi positif. Namun demikian, capaian pada indikator ini harus dilihat secara bersamaan dengan capaian pada indikator 16.1.2(a) yang mencatat kematian disebabkan oleh konflik per 100.000 penduduk yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang tingkat kekerasan yang mungkin terjadi di suatu wilayah. Sementara itu, indikator 16.2.2* yang mencatat angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk, menyoroti masalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Indikator ini tidak hanya membantu dalam memahami dimensi perdagangan manusia, tetapi juga mendukung perumusan kebijakan yang efektif untuk menanggulangi masalah ini.

Lebih lanjut, untuk memastikan akses yang adil terhadap keadilan, indikator 16.3.1(b) yang mengukur persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum, baik melalui litigasi maupun nonlitigasi, menjadi indikator

penting lainnya dalam pencapaian target Tujuan 16. Indikator ini menunjukkan sejauh mana sistem hukum mampu memberikan perlindungan yang setara bagi semua lapisan masyarakat, terlepas dari status sosial dan ekonomi mereka. Sementara itu, aspek akuntabilitas dan transparansi pemerintahan diwakili oleh beberapa indikator, antara lain 16.6.1(a), 16.6.1(b), dan 16.6.1(c), yang masing-masing mengukur persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tingkat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan dan Pelaporan (SAKIP), dan Indeks Reformasi Birokrasi (RB).

Keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan eksekutif diukur melalui indikator 16.7.1(a) dan 16.7.1(b), yang mencatat persentase keterwakilan perempuan di DPR/DPRD dan lembaga eksekutif Eselon I dan II. Sementara itu, indikator 16.9.1* dan 16.9.1(a)(b) menyoroti pentingnya pencatatan sipil, khususnya dalam registrasi kelahiran anak di bawah 5 tahun, serta kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk 0-17 tahun. Terakhir, dalam rangka meningkatkan akses informasi publik, indikator 16.10.2(a) memantau jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif. Secara keseluruhan, indikator-indikator ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan dan tantangan dalam mencapai Tujuan 16.

Dari penjelasan di atas, dapat diidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam upaya pencapaian target SDGs. Salah satu kendala yang mungkin muncul adalah alokasi sumber daya yang terbatas yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Dalam implementasinya, koordinasi lintas-sektor perlu menjadi fokus perhatian utama karena berbagai program pembangunan pada umumnya melibatkan banyak bidang atau pihak. Ketidakmampuan untuk berkoordinasi secara efektif akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang dilakukan.

Selain alokasi sumber daya dan koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat juga merupakan aspek krusial dalam pencapaian SDGs. Namun faktanya, masih minimnya partisipasi masyarakat karena kurangnya kesadaran akan tujuan SDGs maupun karena faktor-faktor lain seperti ketidakmampuan untuk mengakses informasi atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan memunculkan hambatan tersendiri dalam pengimplementasian program-program pembangunan. Dengan memahami kendala-kendala seperti ini,

pemerintah dapat merumuskan strategi yang lebih efektif agar pembangunan berjalan sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

BAB IV

PELUANG DAN

TANTANGAN PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

4.1 MENGUKUR PENCAPAIAN SDGS

SDGs menetapkan target pembangunan yang spesifik, terikat pada waktu, dan dapat diukur yang sejalan dengan agenda dan prioritas pembangunan (Adjie & Surya, 2019). Oleh karena itu, integrasi SDGs dalam proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik yang baik yang akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, data utama yang digunakan sebagai dasar dalam pengukuran capaian SDGs adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS dianggap sebagai sumber yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan perhitungan proyeksi atau peramalan capaian indikator. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat diuraikan setiap indikator kunci yang menggambarkan kemajuan pembangunan suatu wilayah. Namun demikian perlu diperhatikan pula sejumlah keterbatasan dari data yang dihasilkan oleh BPS.

Keunggulan Data BPS

a. Validitas dan akurasi tinggi

Data yang disediakan oleh BPS diakui memiliki tingkat validitas dan akurasi yang tinggi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode yang terstandarisasi sehingga dapat dipastikan keabsahan dan keandalan data yang diperoleh.

b. Komprehensif dan terintegrasi

BPS mengumpulkan data dari berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga mampu menghasilkan analisis yang

komprehensif dan terintegrasi. Hal ini sangat penting untuk mengukur berbagai indikator SDGs yang mencakup banyak aspek kehidupan masyarakat.

c. Ketersediaan data historis

BPS memiliki rekam jejak data yang panjang dan konsisten sehingga memungkinkan analisis tren historis dan proyeksi masa depan. Data historis ini sangat berguna untuk memahami perkembangan dan kemajuan pembangunan dari waktu ke waktu.

Keterbatasan Data BPS

a. Keterbatasan data di tingkat lokal

Meskipun data BPS sangat komprehensif di tingkat nasional dan provinsi, ketersediaan data di tingkat kabupaten/kota masih terbatas. Hal ini menyulitkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan yang spesifik dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi lokal untuk sejumlah indikator SDGs.

b. Keterbatasan waktu pembaruan data

Proses pengumpulan dan publikasi data BPS sering kali memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam beberapa kasus, data yang tersedia mungkin sudah tidak lagi mencerminkan kondisi terkini yang dapat menghambat pengambilan keputusan yang responsif.

c. Ketergantungan pada sensus dan survei skala besar

BPS sering kali mengandalkan sensus dan survei besar yang dilakukan secara periodik. Keterbatasan ini berarti data tidak selalu tersedia dalam periode waktu terkini dan bisa menjadi kurang relevan dalam konteks pembangunan yang cepat berubah.

Untuk mengatasi kelemahan ini maka diperlukan strategi tambahan seperti pengumpulan data secara mandiri, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk data *real-time*, serta membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga dan organisasi yang dapat menyediakan data pelengkap.

4.2 MEMAHAMI PROYEKSI CAPAIAN SDGS: PENDEKATAN PRAKTIS

Proyeksi capaian merupakan langkah lanjutan setelah pemetaan ketersediaan data indikator-indikator SDGs. Proyeksi ini tidak hanya

memberikan gambaran tentang kemungkinan pencapaian target-target SDGs di masa mendatang, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus serta sumber daya yang perlu dialokasikan. Dengan melakukan proyeksi, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat menentukan prioritas kebijakan dan penguatan program untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Disamping itu, proyeksi capaian SDGs dapat digunakan untuk memantau kemajuan secara berkala dan memastikan bahwa strategi pembangunan tetap berada pada jalur implementasi yang benar dan tepat sasaran.

Hasil dari proyeksi capaian SDGs juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan target yang ingin dicapai. Dalam konteks SDGs, proyeksi dilakukan menggunakan skenario *business as usual* untuk memperkirakan perkembangan indikator-indikator SDGs berdasarkan tren dan kebijakan yang ada tanpa intervensi tambahan. Pendekatan ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami sejauh mana tujuan-tujuan SDGs dapat dicapai jika tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan atau implementasi program. Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi, proyeksi ini menjadi instrumen penting yang dapat memberi arah bagi pemerintah dalam merumuskan intervensi untuk memastikan tercapainya target SDGs secara menyeluruh. Dalam penghitungannya, proses proyeksi capaian SDGs melibatkan beberapa tahapan penting antara lain:

1. Menentukan indikator yang akan diproyeksikan

Langkah pertama dalam proyeksi adalah menentukan indikator mana yang akan diproyeksikan. Indikator yang dipilih harus relevan dengan tujuan SDGs yang ingin dicapai dan mencerminkan aspek-aspek penting dari pembangunan yang sedang dipantau. Pada tahap ini, ketersediaan data historis yang memadai dan kualitas data yang baik harus dipertimbangkan untuk menghasilkan data proyeksi yang dapat diandalkan.

2. Melakukan pemetaan ketersediaan data

Langkah berikutnya adalah melakukan pemetaan terhadap ketersediaan data. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah data yang dibutuhkan tersedia dan apakah data tersebut memiliki kualitas yang cukup baik untuk digunakan dalam proyeksi. Data yang diperlukan bisa

berasal dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian terkait, dan sumber data lainnya. Ketersediaan data yang baik akan menentukan akurasi proyeksi yang dihasilkan.

3. Mempersiapkan *data series* dari indikator yang akan diproyeksikan
Tahap ini melibatkan pengumpulan dan penyusunan data series dari indikator yang akan diproyeksikan. Data series yang baik harus mencakup periode waktu yang cukup panjang untuk memungkinkan identifikasi tren yang signifikan. Data ini kemudian disusun sedemikian rupa, mencakup pengisian nilai yang hilang dan standarisasi format data, agar siap digunakan dalam analisis proyeksi.
4. Melakukan validasi terhadap hasil proyeksi
Setelah pemetaan data selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proyeksi menggunakan metode statistik atau model yang sesuai. Namun, hasil proyeksi awal perlu divalidasi untuk memastikan keakuratannya. Validasi ini bisa dilakukan dengan membandingkan hasil proyeksi dengan data aktual dari periode sebelumnya. Validasi juga melibatkan pemeriksaan terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam model proyeksi untuk memastikan bahwa asumsi tersebut realistis dan relevan.
5. Melakukan analisis ketercapaian indikator dengan skenario *business as usual*
Tahap akhir adalah melakukan analisis ketercapaian indikator dengan skenario *business as usual*. Analisis ini mengkaji apakah indikator-indikator SDGs dapat dicapai sesuai target jika tidak ada intervensi tambahan. Hasil analisis ini sangat penting untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih atau intervensi khusus. Berdasarkan hasil proyeksi ini, maka pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memastikan pencapaian tujuan SDGs.
Untuk mempermudah proses evaluasi, maka selanjutnya tingkat ketercapaian target SDGs dibagi ke dalam lima kategori sebagai berikut:
 - a. Kelompok A mencakup indikator yang diproyeksi memiliki tingkat ketercapaian target SDGs sebesar 100% pada tahun 2030;
 - b. Kelompok B mencakup indikator yang diproyeksi memiliki tingkat ketercapaian target SDGs minimal 90% pada tahun 2030;

- c. Kelompok C mencakup indikator yang diproyeksi memiliki tingkat ketercapaian target SDGs minimal 75% pada tahun 2030;
- d. Kelompok D mencakup indikator yang diproyeksi memiliki tingkat ketercapaian target SDGs minimal 50% pada tahun 2030; dan
- e. Kelompok E mencakup indikator yang diproyeksikan memiliki tingkat ketercapaian target SDGs di bawah 50% pada tahun 2030.

Dalam konteks Kota Gorontalo, Pembahasan proyeksi capaian SDGs terfokus pada upaya dan strategi yang diterapkan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Kota Gorontalo, sebagai entitas administratif yang berkomitmen terhadap pencapaian SDGs, telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mempercepat kemajuan dalam berbagai dimensi pembangunan berkelanjutan. Melalui proyeksi capaian SDGs yang komprehensif dan terarah, Kota Gorontalo menegaskan komitmennya untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera bagi semuaarganya.

Indikator 1.1.1: Tingkat kemiskinan ekstrim

Indikator 1.1.1 berkaitan dengan pengukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang merupakan salah satu target utama dalam SDGs yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia. Indikator ini mengukur proporsi populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional yang ditetapkan oleh Bank Dunia yaitu \$1.90 per hari. SDGs menetapkan target bahwa pada tahun 2030 kemiskinan ekstrem harus dihapuskan untuk semua orang di mana pun berada. Namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam upaya pencapaian target ini dimana salah satunya adalah dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk situasi kemiskinan global.

Di Kota Gorontalo, tingkat kemiskinan ekstrem menunjukkan angka yang stagnan dan bahkan meningkat dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017, tingkat kemiskinan ekstrem berada di angka 11,95%, kemudian sedikit menurun pada tahun 2018 menjadi 11,91%, namun meningkat lagi hingga mencapai 12,94% pada tahun 2021. Sementara itu, target SDGs menuntut target 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Berdasarkan tren yang ada, proyeksi pencapaian indikator ini masih masuk pada kategori E. Angka yang stagnan dan cenderung meningkat ini mengindikasikan bahwa diperlukan tindakan program dan kegiatan yang lebih signifikan untuk mempercepat

penurunan kemiskinan ekstrem secara drastis. Untuk mencapai target 0% pada tahun 2030, diperlukan strategi dan intervensi yang lebih komprehensif, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas penduduk miskin.

Indikator 1.2.1: Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional

Indikator 1.2.1 adalah salah satu indikator pada Tujuan 1 yang mengukur persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pengukuran ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran nyata tentang jumlah penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Disamping itu, indikator ini juga memantau kemajuan dalam mencapai target SDGs untuk mengurangi setidaknya separuh proporsi pria, wanita, dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan dalam semua dimensinya menurut definisi nasional pada tahun 2030. Dengan melacak persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus dan mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

Di Kota Gorontalo, data historis menunjukkan beberapa fluktuasi dalam persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional tercatat sebesar 5,7%. Angka ini sedikit menurun pada tahun 2018 menjadi 5,57% dan kembali turun pada tahun 2019 menjadi 5,45%. Namun, pada tahun 2020, persentase ini naik menjadi 5,59%, kemudian meningkat lebih lanjut menjadi 5,93% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, terjadi sedikit penurunan persentase penduduk miskin Kota Gorontalo menjadi 5,73%. Pemerintah Kota Gorontalo menargetkan penurunan persentase penduduk miskin menjadi 5,38% pada tahun 2024 sesuai dengan target RPJMD, sementara target nasional untuk indikator ini adalah antara 6,0% hingga 7,0% pada tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden No 111 Tahun 2022. Sementara itu, SDGs menetapkan target yang lebih ambisius yakni sebesar 3,25% pada tahun 2030. Berdasarkan data historis dan tren yang ada, proyeksi capaian untuk indikator ini masuk pada kategori C. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang

dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, hasil yang dicapai belum cukup signifikan untuk mencapai target SDGs yang lebih ambisius.

Beberapa faktor yang mempengaruhi persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Kota Gorontalo meliputi ketersediaan lapangan kerja, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan program bantuan sosial. Akses terhadap lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kurangnya lapangan kerja yang memadai dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. Selain itu, pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu cara utama untuk keluar dari kemiskinan sehingga pemerintah Kota Gorontalo perlu memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke pendidikan yang baik. Akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas juga dapat membantu mencegah kemiskinan dengan mengurangi beban biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat miskin. Program bantuan sosial yang tepat sasaran dan efektif akan mendorong percepatan pencapaian target pada indikator ini meskipun diperlukan evaluasi dan penyesuaian terus-menerus dari program-program yang diimplementasikan untuk memastikan dampaknya secara maksimal.

Indikator 1.2.2: Persentase laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi

a. Dimensi Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah).

Rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan peningkatan yang sangat lambat dari 10.32 tahun pada 2017 menjadi 10.39 tahun pada 2022. Target RPJMD untuk tahun 2024 adalah 10.40 tahun, sedangkan Target SDGs adalah 12 tahun. Melihat perbandingan capaian dan target, maka proyeksi capaian untuk indikator ini masuk pada kategori C. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun menunjukkan kemajuan setiap tahunnya, peningkatan yang lebih signifikan diperlukan untuk mempercepat pencapaian target SDGs di tahun 2030.

b. Dimensi Standar Hidup (Sanitasi): Persentase rumah tangga tidak mempunyai wc layak.

Persentase rumah tangga tanpa WC layak mengalami penurunan dari 15,98% pada 2018 menjadi 7,1% pada 2021, namun sedikit meningkat lagi menjadi 7,91% pada 2022. Target RPJMD adalah 10% untuk tahun

2024 dan Target SDGs adalah 0%. Pada tahun 2030, indikator ini diproyeksikan 100% dapat mencapai target sehingga masuk pada kategori capaian A. Capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dan kemungkinan besar tercapainya target SDGs jika tren positif terus berlanjut.

- c. Dimensi Standar Hidup (Akta Kelahiran): Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran.

Indikator ini menunjukkan penurunan signifikan dari 4,94% pada 2017 menjadi 2,23% pada 2022. Target RPJMD untuk tahun 2024 dan Target SDGs untuk tahun 2030 adalah 0%. Proyeksi capaian ini juga diproyeksikan 100% akan mencapai target, baik target di tahun 2024 maupun di tahun 2030, sehingga masuk pada kategori capaian A.

Indikator 1.4.1: Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar

- a. Penduduk dengan akses pada layanan air minum

Akses penduduk terhadap layanan air minum meningkat secara signifikan dari 93,78% pada 2018 menjadi 100% pada 2022. Target RPJMD untuk tahun 2024 adalah 80%, sementara Target SDGs tahun 2030 adalah 100%. Dengan capaian kinerja 100% pada tahun 2022, maka indikator ini masuk pada kategori capaian A.

- b. Penduduk dengan akses pada layanan sanitasi dasar

Akses terhadap layanan sanitasi dasar meningkat dari 84,99% pada 2017 menjadi 92,09% pada 2022. Target RPJMD untuk tahun 2024 adalah 90%, dan target SDGs adalah 100%. Proyeksi capaian ini juga masuk pada kategori A yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program terkait indikator ini berada di jalur yang tepat untuk mencapai target global.

Indikator 2.2.1: Prevalensi stunting pada anak balita

Prevalensi stunting pada anak balita adalah indikator kunci dalam mengevaluasi status gizi dan pertumbuhan anak di bawah usia lima tahun. Stunting terjadi ketika anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari rata-rata yang seharusnya sesuai dengan usia mereka, dan kondisi ini biasanya terkait erat dengan masalah gizi kronis, kekurangan gizi, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi yang tidak mendukung. Data Kota Gorontalo

menunjukkan bahwa prevalensi stunting mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017, tercatat prevalensi stunting pada balita sebesar 30,80% sedangkan pada tahun 2021 turun menjadi 19,10%. Penurunan ini mencerminkan adanya upaya-upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu program gizi, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, ataupun perubahan kebijakan yang mendukung gizi anak. Pada tahun 2030, indikator ini diproyeksi memiliki capaian sebesar 11,69% dan masuk pada kategori A karena tingkat ketercapaian 98% dari target global.

Indikator 2.2.2: Prevalensi wasting pada anak balita

Peningkatan kesadaran akan pentingnya nutrisi yang memadai bagi pertumbuhan dan perkembangan anak telah mendorong upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi prevalensi wasting pada anak balita. Prevalensi wasting menggambarkan persentase anak di bawah usia lima tahun dengan berat badan lebih rendah dari standar yang diharapkan untuk tinggi badan mereka menjadi sorotan utama dalam upaya pencegahan stunting dan masalah gizi lainnya. Meskipun capaian pada indikator ini di Kota Gorontalo menunjukkan tren yang fluktuatif dalam beberapa tahun kebelakang, namun rata-rata tren keseluruhan menunjukkan penurunan yang signifikan dalam prevalensi wasting dari tahun 2018 hingga 2024. Upaya pemerintah untuk menurunkan prevalensi wasting hingga tahun 2030 mencerminkan komitmen yang kuat dalam mencapai perubahan yang berkelanjutan terkait masalah gizi anak. Pada tahun 2030 diproyeksikan prevalensi wasting Kota Gorontalo berada pada capaian 0,17%, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar <5%. Dengan demikian, proyeksi capaian Kota Gorontalo pada indikator ini masuk pada kategori A.

Indikator 3.1.1*: Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi tolok ukur yang sangat penting dalam mengevaluasi kesehatan maternal di suatu wilayah. Pada tahun 2017, AKI Kota Gorontalo tercatat sebesar 179.1 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2018, terjadi penurunan yang signifikan menjadi 127.3 namun pada tahun 2019 meningkat secara dramatis menjadi 229.9, melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Gorontalo. Meskipun demikian, pada tahun 2020 menunjukkan adanya penurunan yang cukup besar, dengan AKI

mencapai 213 meskipun tetap berada di atas target RPJMD. Lambatnya penurunan AKI setiap tahunnya menghasilkan proyeksi AKI di tahun 2030 masih berada pada angka 136.1 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini tentunya masih berada jauh diatas target global yang ditetapkan yaitu sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup. Dengan demikian, indikator ini masuk pada kategori E dengan proyeksi capaian masih dibawah 50% dari target SDGs tahun 2030.

Indikator 3.1.2*: Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan

Pada periode 2017 hingga 2022, terjadi fluktuasi dalam proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang mendapat bantuan dari tenaga kesehatan terlatih dan melahirkan di fasilitas kesehatan. Pada tahun 2017, proporsi perempuan yang mendapat bantuan dari tenaga kesehatan terlatih adalah 96,64%, sedangkan yang melahirkan di fasilitas kesehatan adalah 98,65%. Selama tahun-tahun berikutnya, terjadi peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2022 proporsi perempuan yang proses melahirkannya mendapat bantuan dari tenaga kesehatan terlatih memiliki capaian sebesar 93,74%, sementara yang melahirkan di fasilitas kesehatan sebesar 94,78%. Meskipun terdapat fluktuasi dalam lima tahun periode tersebut, proyeksi pada indikator ini menunjukkan hasil yang mendekati target SDGs di tahun 2030 (100%) sehingga masuk pada kategori capaian B.

Indikator 3.2.1*: (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Pembahasan data indikator Angka Kematian Balita (AKBa) dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup menggambarkan tren penurunan yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2020, namun mengalami kenaikan pada tahun 2021. Pada tahun 2017, AKBa mencapai 39 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan AKB sebesar 37. Tren penurunan terlihat pada tahun-tahun berikutnya, di mana pada tahun 2018, AKBa turun menjadi 31 dan AKB menjadi 27. Penurunan ini berlanjut hingga tahun 2020 dengan pencapaian terbaik pada tahun tersebut, yaitu AKBa 29 dan AKB 28. Namun demikian, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2021, di mana AKBa melonjak menjadi 48 dan AKB mencapai 47. Hal ini dipengaruhi oleh

dampak pandemi Covid-19 dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Pada indikator ini, target yang ditetapkan dalam SDGs tahun 2030 yaitu 25 untuk AKBa dan 20 untuk AKB. Proyeksi capaian pada tahun 2030 menunjukkan upaya untuk mencapai target tersebut dengan angka yang lebih rendah dari target, yaitu 21 untuk AKBa dan 20 untuk AKB.

Indikator 3.2.2*: Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah ukuran yang mengindikasikan jumlah kematian bayi di bawah usia 28 hari per 1000 kelahiran hidup. Penurunan AKN merupakan pencapaian yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup bayi. Angka yang semakin rendah menunjukkan peningkatan akses terhadap perawatan prenatal yang berkualitas, perawatan neonatal, dan peningkatan kondisi sanitasi yang bersih, semuanya berkontribusi pada penurunan angka kematian ini. Namun demikian, masalah kematian neonatal masih menjadi tantangan di banyak negara, dengan faktor risiko seperti akses terbatas terhadap perawatan kesehatan, gizi buruk, dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup di Kota Gorontalo dalam lima tahun terakhir menunjukkan penurunan yang signifikan dari 29 pada tahun 2017 menjadi 20 pada tahun 2021. Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2019, tren keseluruhan menunjukkan penurunan yang stabil. Namun demikian, dari perbandingan antara target tahun 2030 sebesar 12 dan proyeksi capaian di tahun tersebut sebesar 16 terlihat bahwa masih ada tantangan besar yang harus diatasi untuk mencapai target SDGs.

Indikator 3.a.1*: Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun

Pentingnya mengurangi prevalensi merokok pada penduduk usia muda tidak bisa diabaikan. Merokok pada usia muda dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan yang serius, seperti gangguan pernapasan, penurunan fungsi paru-paru, dan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, kebiasaan merokok yang dimulai pada usia muda cenderung berlanjut ke usia dewasa, meningkatkan risiko ketergantungan nikotin dan masalah kesehatan jangka panjang. Selama periode 2018 hingga 2022, data menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam persentase merokok pada penduduk usia 15

hingga 25 tahun di Kota Gorontalo. Pada tahun 2018, angka prevalensi merokok pada kelompok usia tersebut mencapai 30%, namun turun tajam menjadi 15,38% pada tahun 2019. Meskipun mengalami kenaikan sedikit pada tahun 2020 dan 2021, dengan masing-masing mencapai 19,18% dan 14,31%, namun angka tersebut kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 13,42%. Adapun target SDGs untuk indikator ini pada tahun 2030 adalah 17,05%, yang merupakan penurunan 50% dari capaian pada tahun 2015. Proyeksi capaian pada tahun 2030 menunjukkan angka jauh lebih rendah dari target tersebut dengan capaian sebesar 3,3%. Proyeksi capaian Kota Gorontalo pada indikator ini pun masuk pada kategori A yang menunjukkan adanya pencapaian yang positif dalam mengurangi prevalensi merokok di kalangan penduduk usia muda.

Indikator 4.1.2.(a): Angka anak tidak sekolah jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat.

Dalam konteks pencapaian SDGs, isu anak tidak sekolah menjadi salah satu aspek krusial yang memerlukan perhatian serius. Anak-anak yang tidak mendapatkan akses dan kesempatan yang cukup dalam pendidikan tidak hanya menghadapi risiko kekurangan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mengalami keterbatasan dalam mencapai potensi penuh mereka. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai target SDGs 2030 yang mengamanahkan pencapaian pendidikan berkualitas untuk semua, analisis data indikator tentang jumlah anak tidak sekolah di Kota Gorontalo menjadi penting. Dari data historis yang telah dikumpulkan, tingkat anak tidak sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD) mengalami penurunan yang drastis dari 1,09% pada tahun 2017 menjadi hanya 0,03% pada tahun 2022. Fenomena serupa juga terlihat pada tingkat pendidikan menengah pertama (SMP), dengan penurunan dari 4,46% pada tahun 2017 menjadi 3,22% pada tahun 2022. Meskipun demikian, pada tingkat pendidikan menengah atas (SMA), meskipun mengalami fluktuasi yang minor dari tahun ke tahun, angka tidak sekolah tetap relatif tinggi dengan capaian 22,1% pada tahun 2022. Angka tidak sekolah untuk tingkat pendidikan SD dan SMP pada tahun 2030 diproyeksikan akan mencapai target sebesar 0%, namun masih diperlukan adanya intervensi dari pemerintah untuk menekan angka anak tidak sekolah pada tingkat SMA.

Indikator 4.2.2*: Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin

Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir satu tahun sebelum usia sekolah dasar merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kesiapan anak-anak untuk memasuki jenjang pendidikan formal. Di Kota Gorontalo, data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anak dalam pembelajaran terorganisir sebelum memasuki usia sekolah dasar mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, tingkat partisipasi tercatat sebesar 20,86%, meningkat menjadi 24,5% pada tahun 2019, dan terus naik hingga mencapai 30,09% pada tahun 2020. Meskipun sedikit mengalami penurunan menjadi 29,19% pada tahun 2021, tren keseluruhan pada indikator ini menunjukkan pertumbuhan yang positif. Meskipun demikian, proyeksi capaian pada tahun 2030 diperkirakan baru mencapai 38,2%, masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Diperlukan pemerataan akses dan pembangunan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh anak di Kota Gorontalo, tanpa terkecuali, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir sebelum memasuki usia sekolah dasar sebagai fondasi yang kuat bagi generasi mendatang untuk sukses dalam pendidikan formal dan kehidupan selanjutnya.

Indikator 4.3.1.(a): Angka Partisipasi Kasar PT (APK PT)

Dalam konteks meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana masyarakat memperoleh akses ke pendidikan tinggi. Kota Gorontalo menunjukkan tren peningkatan APK Perguruan Tinggi yang cukup signifikan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, APK Perguruan Tinggi tercatat sebesar 60,05% dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 66,35% pada tahun 2021, meskipun sedikit menurun menjadi 64,92% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya mendorong lebih banyak lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan untuk tahun 2030 yaitu sebesar 100%. Proyeksi capaian APK Perguruan Tinggi untuk tahun 2030

diperkirakan baru mencapai 68,7% sehingga masih menunjukkan adanya gap yang signifikan untuk mencapai target SDGs.

Indikator 4.5.1*: Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki

Dalam rangka mencapai tujuan SDGs, khususnya tujuan ke-4 yang berfokus pada pendidikan berkualitas, penting untuk memperhatikan kesetaraan gender dalam akses pendidikan. Salah satu indikator kunci yang digunakan untuk mengukur kesetaraan ini adalah Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki. Indikator ini menggambarkan proporsi partisipasi pendidikan antara perempuan dan laki-laki yang mencerminkan kesetaraan kesempatan bagi kedua gender dalam memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang. Rasio yang mendekati 1 mengindikasikan adanya kesetaraan partisipasi antara perempuan dan laki-laki. Di Kota Gorontalo, analisis APM menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam akses pendidikan mengalami variasi tergantung pada jenjang pendidikan. Data menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan dasar (SD), proyeksi APM perempuan terhadap laki-laki di tahun 2030 mendekati 1 dengan proyeksi capaian sebesar 0.80. Sementara itu pada tingkat pendidikan menengah pertama (SMP) rasio APM perempuan terhadap laki-laki menunjukkan adanya fluktuasi yang mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan kesetaraan gender. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap hal ini termasuk beban sosial dan budaya yang mempengaruhi partisipasi anak perempuan dalam pendidikan, serta tantangan ekonomi yang dapat menghalangi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tingkat menengah atas (SMA), data historis dan proyeksi capaian menunjukkan bahwa jumlah anak perempuan yang bersekolah setara atau lebih banyak dibandingkan anak laki-laki dengan proyeksi capaian di tahun 2030 sebesar 1.11.

Indikator 4.6.1.(a): Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun

Analisis data historis persentase angka melek aksara penduduk berusia ≥ 15 tahun di Kota Gorontalo menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017, angka melek aksara tercatat

sebesar 99,08%, kemudian meningkat menjadi 99,56% pada tahun 2018. Pada tahun 2019, persentase tersebut hampir mencapai kesempurnaan dengan 99,87%. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2020 menjadi 99,61%, capaian ini kembali meningkat signifikan hingga mencapai 100% pada tahun 2021. Pencapaian angka 100% pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Kota Gorontalo telah berhasil mencapai target SDGs untuk tahun 2030 lebih awal dari periode waktu yang ditentukan. Hal ini merupakan indikator positif bahwa upaya-upaya peningkatan akses pendidikan dan program literasi di Kota Gorontalo telah berjalan dengan efektif. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan peningkatan dalam aspek pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, mengingat dinamika populasi dan tantangan pendidikan yang terus berkembang maka perlu adanya strategi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa tingkat melek aksara tetap berada pada angka optimal.

Indikator 5.b.1*: Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam

Dalam analisis data mengenai proporsi individu yang menguasai atau memiliki telepon genggam di Kota Gorontalo, terlihat fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun 2017 hingga 2022. Pada tahun 2017, proporsi ini tercatat sebesar 84,63%. Pada tahun 2018, capaian indikator ini sedikit menurun menjadi 83,48% dan terus turun menjadi 81,54% pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, terjadi lonjakan yang cukup signifikan pada capaian indikator ini hingga mencapai 89,83%. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 86,16%, proporsi ini kembali meningkat secara drastis pada tahun 2022 mencapai 92,52%. Adapun proyeksi capaian untuk tahun 2030 menunjukkan peningkatan yang sangat optimistis dengan proyeksi angka capaian sebesar 104,44%, melampaui target SDGs yang menetapkan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo diproyeksikan dapat melampaui target universal dalam hal kepemilikan dan penguasaan telepon genggam. Tren ini mencerminkan upaya yang terus dilakukan dalam meningkatkan aksesibilitas teknologi dan komunikasi bagi masyarakat. Peningkatan ini juga diharapkan dapat mendukung berbagai aspek pembangunan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan partisipasi sosial,

mengingat pentingnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari di era digital saat ini.

Indikator 6.1.1*: Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman merupakan indikator penting yang mencerminkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Di Kota Gorontalo, data historis menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 99,99% rumah tangga telah menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo sudah hampir mencapai target SDGs 2030 yang ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini menandakan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyediakan akses air minum yang aman dan terkelola dengan baik bagi seluruh warganya. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur air minum, memastikan kualitas air tetap sesuai standar kesehatan, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan air yang aman dan higienis dapat terus diupayakan agar Kota Gorontalo mampu melampaui target SDGs di 2030 dan memastikan bahwa semua rumah tangga mendapatkan akses penuh terhadap layanan air minum yang aman dan terkelola secara baik.

Indikator 6.2.1.(c): Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka

Di Kota Gorontalo, data tahun 2020 menunjukkan bahwa 1,62% rumah tangga masih mempraktikkan BABS. Angka ini menandakan tantangan yang harus dihadapi dalam memperbaiki kualitas sanitasi dan kebersihan lingkungan. Target SDGs untuk tahun 2030 adalah mencapai 0% rumah tangga yang mempraktikkan BABS. Untuk mencapainya, diperlukan peningkatan infrastruktur sanitasi, edukasi tentang pentingnya sanitasi yang baik, serta kebijakan yang mendukung perubahan perilaku masyarakat. Kolaborasi dengan komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya juga penting untuk mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sanitasi yang baik. Meskipun tantangan tersebut cukup besar, Kota Gorontalo dapat mencapai target SDGs untuk menghapus praktik BABS pada tahun 2030 dengan strategi yang tepat dan upaya kolaboratif untuk

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Indikator 7.1.1*: Rasio elektrifikasi

Rasio elektrifikasi merupakan indikator yang mencerminkan akses masyarakat terhadap energi listrik yang andal dan terjangkau. Data capaian rasio elektrifikasi di Kota Gorontalo menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017, rasio elektrifikasi tercatat sebesar 85,91%, yang kemudian meningkat drastis menjadi 99,45% pada tahun 2021. Tren peningkatan ini menunjukkan upaya yang berhasil dalam memperluas akses listrik kepada masyarakat di Kota Gorontalo. Proyeksi capaian tahun 2030 menunjukkan optimisme bahwa Kota Gorontalo akan mencapai rasio elektrifikasi sebesar 100%, sesuai dengan target SDGs. Pencapaian ini berarti bahwa seluruh masyarakat Kota Gorontalo akan memiliki akses penuh terhadap listrik pada tahun 2030. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga, tetapi juga membuka peluang bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Indikator 8.1.1*: Laju pertumbuhan PDRB per kapita

Proyeksi capaian pada indikator ini untuk tahun 2030 menunjukkan angka yang optimis yaitu 7,05%. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo diperkirakan akan mampu mencapai target SDGs tahun 2030 yang ditetapkan sebesar 7%. Hal ini mencerminkan potensi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang positif di masa mendatang. Proyeksi ini memberikan gambaran bahwa dengan kebijakan dan strategi yang tepat, Kota Gorontalo memiliki peluang besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan tujuan SDGs. Upaya yang berfokus pada peningkatan investasi, pengembangan sektor-sektor unggulan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menjadi kunci dalam mencapai proyeksi tersebut dan memastikan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Kota Gorontalo.

Indikator 8.1.1.(a): PDB per kapita

Salah satu indikator kunci untuk mengukur kemajuan ini adalah Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Data capaian PDB per kapita Kota

Gorontalo menunjukkan peningkatan yang signifikan dari USD7.170,26 pada tahun 2017 menjadi USD9.451,52 pada tahun 2021. Proyeksi untuk tahun 2030 menunjukkan optimisme yang tinggi dengan perkiraan PDB per kapita mencapai USD17.438,84. Sementara itu, target SDGs tahun 2030 untuk PDB per kapita ditetapkan sebesar USD8.255,5 yang artinya Kota Gorontalo diproyeksikan tidak hanya akan mencapai tetapi juga melampaui target tersebut dengan selisih yang cukup besar. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan di wilayah tersebut. Dengan capaian dan proyeksi yang ada, Kota Gorontalo berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya sejalan dengan agenda global SDGs.

Indikator 11.1.1.(a): Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Dalam analisis indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Kota Gorontalo, pada tahun 2021 sebanyak 89,73% rumah tangga telah memiliki akses tersebut. Angka ini menunjukkan capaian yang signifikan dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Kota Gorontalo. Mengacu pada target SDGs tahun 2030 yang menetapkan target capaian sebesar 78,77%, Kota Gorontalo diproyeksikan tidak hanya dapat mencapai, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian dan memperluas akses terhadap perumahan yang terjangkau. Upaya-upaya tersebut mencakup pembangunan perumahan baru, perbaikan fasilitas hunian yang ada, serta berbagai inisiatif untuk mendukung keluarga berpenghasilan rendah dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

Indikator 16.6.1.(b): Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai minimal B menjadi indikator penting dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan. Kota Gorontalo telah mencapai persentase 66,94% pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa mayoritas instansi pemerintah di kota ini telah mencapai standar yang baik dalam hal akuntabilitas dan pelaporan kinerja. Proyeksi capaian pada indikator ini di

tahun 2030 sebesar 71,38% mengindikasikan adanya potensi peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan, meskipun masih di bawah target yang diharapkan. Peningkatan ini dapat dicapai melalui berbagai strategi, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi yang lebih efektif dalam pelaporan dan evaluasi kinerja, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal. Oleh karena itu, mencapai dan bahkan melampaui target 80% instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B menjadi tujuan yang harus dicapai melalui komitmen bersama dan implementasi kebijakan yang konsisten serta berkelanjutan.

Indikator 16.6.1.(c): Persentase instansi pemerintah dengan indeks RB \geq B

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, persentase instansi pemerintah yang mencapai indeks Reformasi Birokrasi (RB) dengan nilai minimal B menjadi indikator penting. Pada tahun 2021, Kota Gorontalo mencatat capaian sebesar 63,03% instansi pemerintah dengan indeks RB \geq B yang menunjukkan bahwa sebagian besar instansi telah memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. Untuk mencapai target yang lebih tinggi dan sejalan dengan proyeksi capaian tahun 2030 sebesar 90,02% maka diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Upaya ini termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi dalam proses administrasi, serta penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi. Dengan terus mendorong implementasi reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, Kota Gorontalo diharapkan dapat mencapai target yang ditetapkan, serta berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut.

Indikator 16.9.1*: Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur

Di Kota Gorontalo, proporsi anak di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil mencapai 99% pada tahun 2021. Angka ini menunjukkan hampir semua kelahiran telah tercatat secara resmi, yang merupakan prestasi signifikan dalam mendekati target SDGs sebesar 100%. Proyeksi capaian untuk tahun 2030 diperkirakan mencapai 99,69%, yang mendekati target global, namun masih menyisakan sedikit ruang untuk

perbaikan. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk menjembatani kesenjangan ini dan memastikan bahwa setiap kelahiran dicatat secara resmi. Hal ini penting untuk memberikan identitas hukum bagi setiap anak yang merupakan dasar bagi perlindungan hak-hak mereka. Pemerintah Kota Gorontalo perlu terus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan kelahiran serta memperkuat sistem pencatatan sipil untuk mencapai dan mempertahankan tingkat pencatatan yang optimal sesuai dengan target SDGs 2030.

Indikator 16.9.1.(b): Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun

Pada tahun 2021 persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kota Gorontalo mencapai 95,03%. Angka ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam memastikan bahwa hampir semua anak di wilayah ini memiliki identitas resmi yang diakui oleh negara, yang esensial untuk akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Meskipun capaian ini sudah tinggi, masih terdapat kesenjangan menuju target SDGs yang menetapkan cakupan 100% kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2030. Proyeksi capaian untuk tahun 2030 di Kota Gorontalo adalah 98,31%. Peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya akta kelahiran, penyederhanaan proses administrasi, serta peningkatan aksesibilitas layanan pencatatan sipil terutama di daerah terpencil dapat menjadi upaya tambahan yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa semua anak memperoleh akta kelahiran. Memastikan setiap anak memiliki akta kelahiran tidak hanya memenuhi target statistik, tetapi juga mengukuhkan hak asasi dan kesejahteraan anak-anak di Kota Gorontalo.

Indikator 17.1.1*: Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB

Dalam konteks analisis ekonomi, total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator penting yang mencerminkan kapasitas fiskal dan kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi. Data capaian Kota Gorontalo menunjukkan penurunan yang signifikan dalam proporsi ini dari 13,33% pada tahun 2017 menjadi 11,41% pada tahun 2021. Penurunan ini mengindikasikan bahwa

meskipun PDB mungkin mengalami pertumbuhan, pendapatan yang berhasil dikumpulkan pemerintah tidak meningkat sejalan dengan pertumbuhan tersebut. Proyeksi capaian untuk tahun 2030 memperkirakan angka ini akan semakin menurun menjadi 9,52%. Penurunan ini dapat mencerminkan tantangan dalam efisiensi pemungutan pajak, perluasan basis pajak, atau bahkan perubahan dalam struktur ekonomi lokal. Penurunan proporsi pendapatan terhadap PDB ini perlu dicermati karena bisa mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik, berinvestasi dalam infrastruktur, dan mendukung program-program pembangunan. Untuk mencapai keseimbangan fiskal yang sehat dan memastikan keberlanjutan pembangunan, perlu adanya upaya strategis dalam meningkatkan pendapatan pemerintah serta optimalisasi pengelolaan sumber daya yang ada.

Indikator 17.1.1.(a): Rasio penerimaan pajak terhadap PDB

Rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan fiskal dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan untuk membiayai pelayanan publik. Di Kota Gorontalo, rasio penerimaan pajak terhadap PDB sedikit meningkat dari 0,85% pada tahun 2017 menjadi 0,87% pada tahun 2021. Namun, proyeksi capaian tahun 2030 menunjukkan penurunan menjadi 0,70%. Penurunan proyeksi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks SDGs, yang menargetkan peningkatan rasio penerimaan pajak, penting bagi Kota Gorontalo untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat peningkatan ini dan mencari solusi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Hal ini mencakup reformasi administrasi pajak, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Upaya tersebut tidak hanya akan mendukung pencapaian target SDGs, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih baik.

4.3 PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dalam era pembangunan berkelanjutan, seluruh wilayah di Indonesia harus berupaya untuk mempercepat pencapaian target-target global SDGs tahun 2030. Pemetaan prioritas isu SDGs menjadi langkah penting dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Setelah dilakukannya identifikasi, proyeksi, dan perbandingan data capaian indikator dengan target, langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas di antara isu-isu tersebut. Dengan jumlah isu yang begitu banyak dan sumber daya yang terbatas, fokus pada isu-isu yang paling penting menjadi kunci untuk mencapai kemajuan yang signifikan. Prioritas yang jelas membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien, menghindari penyebaran sumber daya yang tidak merata, dan memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang maksimal.

4.3.1 Kriteria Pendorong Pencapaian Target SDGs

SDGs merupakan serangkaian target dan komitmen global yang bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini. Terdiri dari 17 tujuan yang mencakup berbagai aspek pembangunan, SDGs memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk arah pembangunan suatu daerah. Penerapan SDGs membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang lebih berkelanjutan. Selain itu, SDGs juga berperan penting dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup, termasuk pelestarian sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim.

Di tingkat lokal, penerapan SDGs menjadi sangat penting karena wilayah-wilayah ini adalah tempat di mana kebijakan dan program pembangunan diimplementasikan secara langsung. Melalui penerapan SDGs di tingkat lokal, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kriteria-kriteria yang jelas dalam menilai kemajuan pencapaian SDGs di tingkat daerah. Kriteria ini memungkinkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk

mengukur seberapa jauh kemajuan mereka dalam mencapai target-target SDGs dan mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang telah mereka implementasikan. Dengan memiliki kriteria-kriteria yang jelas, pemerintah daerah dapat menyesuaikan strategi dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif untuk mempercepat pencapaian SDGs di tingkat lokal.

Lima kriteria yang berkaitan erat dengan pencapaian target SDGs di tingkat daerah, yaitu:

(a) Dukungan Regulasi

Dukungan regulasi merupakan salah satu kriteria penting dalam menilai kemajuan pencapaian SDGs di tingkat daerah. Kriteria ini menyoroti peran kebijakan dan regulasi pemerintah dalam membentuk lingkungan yang mendukung upaya pencapaian SDGs. Regulasi yang kuat dan mendukung menjadi landasan bagi implementasi program-program pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Misalnya, kebijakan lingkungan yang ketat dapat memastikan perlindungan sumber daya alam dan konservasi lingkungan hidup, sedangkan kebijakan ekonomi yang inklusif dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dukungan regulasi yang kuat juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan sosial berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pencapaian target SDGs. Di tingkat daerah, penerapan regulasi yang mendukung SDGs dapat dilakukan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan atau peraturan daerah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs.

(b) Prioritas dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

Selain dukungan regulasi, prioritas dalam RPJMD juga menjadi kriteria penting dalam menilai pencapaian SDGs di tingkat daerah. RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang menetapkan arah dan prioritas pembangunan di tingkat daerah dalam jangka waktu tertentu. Integrasi SDGs dalam RPJMD memastikan bahwa prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah selaras dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan menetapkan prioritas ini, sumber daya dan upaya pembangunan dapat dialokasikan secara tepat dan efisien, memastikan bahwa target-target

SDGs di daerah tersebut dapat dicapai dengan lebih baik. Disamping itu, integrasi SDGs dalam RPJMD juga membantu dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi antara berbagai sektor dan program pembangunan. Dengan menempatkan SDGs sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan, berbagai program dan kegiatan pembangunan dapat diarahkan secara konsisten dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, prioritas dalam RPJMD menjadi sangat penting dalam merumuskan strategi pembangunan yang efektif dan efisien untuk mencapai SDGs di tingkat daerah.

(c) Dukungan Kelembagaan

Dukungan kelembagaan merujuk pada keberadaan struktur dan kapasitas lembaga-lembaga pemerintah daerah dalam mendukung implementasi SDGs. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan sebagainya memiliki peran yang krusial dalam menjalankan program-program yang terkait dengan SDGs. Lembaga-lembaga ini berperan dalam memastikan bahwa berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, seperti perlindungan lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan, terintegrasi secara holistik dan terkoordinasi dengan baik. Unit kerja atau badan khusus lainnya yang bertanggung jawab atas pembangunan berkelanjutan juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa SDGs terintegrasi, baik dalam kebijakan dan program pemerintah daerah maupun kebijakan dan program pemerintah pusat. Dengan dukungan kelembagaan yang kuat, pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan dan pengawasan yang efektif terhadap implementasi program-program yang mendorong pencapaian target-target SDGs.

(d) Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran mencakup alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program-program terkait dengan SDGs di tingkat daerah. Pentingnya alokasi anggaran yang efisien dan efektif dalam mencapai target-target SDGs tidak dapat dipandang enteng. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, implementasi program-program SDGs dapat terhambat atau bahkan gagal. Dukungan anggaran yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya

secara tepat guna dan efisien dalam memprioritaskan program-program yang memberikan dampak terbesar terhadap pencapaian SDGs. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun anggaran yang mencerminkan komitmen terhadap pencapaian SDGs dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

(e) Dukungan Kemitraaan.

Dukungan kemitraan merujuk pada kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum dalam mendukung implementasi SDGs. Kemitraan ini merupakan salah satu elemen penting dalam SDGs karena masing-masing pihak memiliki sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan yang berbeda yang dapat saling melengkapi dan dimanfaatkan dalam mencapai tujuan-tujuan SDGs. Melalui kemitraan dengan berbagai pihak, pemerintah daerah dapat memperluas jangkauan dan dampak program-program pembangunan. Sektor swasta dapat berkontribusi dalam hal teknologi, investasi, dan inovasi, sementara organisasi masyarakat sipil dapat membawa perspektif masyarakat yang berdampak terhadap keberhasilan pembangunan. Masyarakat umum juga berperan penting dalam mendukung implementasi SDGs melalui partisipasi aktif dalam program-program pembangunan.

Dari kelima kriteria di atas, selanjutnya dapat ditentukan kriteria mana yang memiliki peran paling signifikan dalam mendorong pencapaian target SDGs di tingkat daerah. Untuk melakukan hal ini, perlu dilakukannya perhitungan bobot dari masing-masing kriteria agar dapat memberikan penekanan yang lebih besar pada kriteria yang dianggap lebih penting (Vaidya & Kumar, 2006). Bobot relatif masing-masing kriteria digunakan untuk menentukan kriteria yang paling dominan dalam pencapaian target SDGs di tingkat daerah. Sebagai contoh, jika dalam penilaian bersama, Dukungan Anggaran dinilai lebih penting daripada Prioritas dalam RPJMD, maka Dukungan Anggaran akan memiliki bobot yang lebih tinggi. Dengan demikian, pemerintah daerah akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kriteria mana yang memberikan pengaruh paling signifikan dalam mencapai SDGs di tingkat lokal. Dalam konteks Kota Gorontalo, penentuan

tingkat urgensi dari kelima faktor dalam penanganan isu SDGs dilakukan melalui penghitungan kriteria yang memiliki bobot tertinggi.

Tabel 4 Urutan Prioritas Kriteria Pencapaian SDGs

Prioritas	Kriteria	Bobot
1	Dukungan Anggaran	0.263
2	Menjadi Prioritas dalam RPJMD	0.239
3	Dukungan Regulasi	0.210
4	Adanya Jejaring Kemitraaan	0.152
5	Dukungan Kelembagaan	0.136

(Sumber: Data diolah, 2023)

Dukungan anggaran memiliki bobot tertinggi sebesar 0.263 menunjukkan pentingnya aspek dukungan finansial dalam penanganan isu SDGs. Anggaran yang memadai memungkinkan perencanaan yang efektif untuk mendukung pencapaian tujuan dan target SDGs. Dengan alokasi dana yang tepat, pemerintah daerah dapat mendukung program-program anti-kemiskinan, meningkatkan akses layanan kesehatan, dan membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, anggaran yang jelas juga dapat memperkuat kepercayaan pihak swasta dan lembaga donor untuk melakukan investasi yang mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan. Anggaran menjadi instrumen strategis untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan solusi berkelanjutan untuk mewujudkan visi SDGs dan mempercepat kemajuan global.

Menjadi program prioritas dalam RPJMD juga mendapatkan bobot yang cukup signifikan yaitu 0.239 dalam mendukung pencapaian target SDGs. RPJMD memainkan peran kunci dalam memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merinci fokus dan strategi pembangunan selama periode tertentu. Keputusan untuk menjadikan suatu inisiatif sebagai prioritas dalam RPJMD menunjukkan kesinambungan dengan tujuan pembangunan jangka menengah. RPJMD memiliki kerangka waktu yang konsisten, memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan program-program prioritas dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Dokumen ini juga menjadi dasar yang kuat untuk pengukuran dan evaluasi

kinerja pembangunan sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk menilai secara objektif sejauh mana capaian program-program prioritas yang tertuang dalam RPJMD mendukung pencapaian target SDGs.

Disamping anggaran dan RPJMD, dukungan regulasi berada sebagai prioritas ketiga dengan bobot sebesar 0.210. Kriteria ini menekankan pentingnya memiliki regulasi sebagai landasan hukum yang mendukung keberlanjutan dan keberhasilan pencapaian target SDGs. Melalui regulasi yang adil dan inklusif, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan memberikan dampak positif yang merata. Regulasi bukan hanya memberikan dasar hukum namun juga membentuk struktur yang mendukung efektivitas upaya menuju pencapaian SDGs. Tanpa dukungan regulasi yang memadai, upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dapat mengalami hambatan serius dalam mengarahkan tindakan dan kebijakan yang selaras dengan tujuan yang ingin dicapai.

Sementara itu, faktor dukungan jejaring kemitraan dan dukungan kelembagaan berada pada prioritas terendah dengan bobot masing-masing 0.152 dan 0.136. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap aspek kemitraan dan kelembagaan mungkin belum menjadi fokus utama dalam perencanaan dan implementasi kebijakan terkait SDGs di Kota Gorontalo. Meskipun demikian, kemitraan dan kelembagaan menyediakan kerangka kerja yang mendukung upaya pembangunan berkelanjutan dengan memfasilitasi kerjasama lintas sektor dan menyusun struktur kelembagaan yang efektif. Oleh karena itu, dukungan kemitraan dan dukungan kelembagaan menjadi elemen integral dalam upaya pencapaian target SDGs di Kota Gorontalo dimana pengaruhnya dapat muncul dalam jangka panjang.

4.3.2 Prioritas Isu SDGs

Disamping pemetaan kriteria atau faktor pendorong pencapaian target SDGs, penentuan isu prioritas SDGs juga menjadi hal yang penting untuk mengarahkan pembangunan daerah. Sejumlah indikator SDGs di Kota Gorontalo diketahui memiliki proyeksi capaian yang masih masuk pada kategori C, D, dan E (Arham, et. al., 2023). Hal ini tentunya menjadi tantangan yang cukup signifikan bagi pemerintah dalam pencapaian target SDGs di tahun 2030. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk menanggapi kondisi ini dengan tepat. Sama seperti dalam penentuan kriteria, penghitungan bobot juga dilakukan untuk menentukan prioritas isu SDGs di

Kota Gorontalo. Hasil dari penghitungan bobot akan memberikan gambaran tentang isu-isu mana yang paling penting untuk diprioritaskan dalam upaya pencapaian SDGs di Kota Gorontalo. Prioritasi isu-isu ini sangat penting karena akan memengaruhi alokasi sumber daya dan perencanaan kebijakan di tingkat lokal. Sebagai ilustrasi, jika isu kesehatan memiliki bobot yang lebih tinggi daripada isu pendidikan, maka dibutuhkan alokasi sumber daya yang lebih banyak dan perencanaan kebijakan yang lebih strategis sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan.

Hasil dari pembobotan isu SDGs di wilayah Kota Gorontalo dijelaskan secara rinci pada tabel berikut ini:

Tabel 5 Pembobotan Skor Prioritas Isu SDGs

No	Isu	Bobot
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	0.687
2	Mengurangi Prevalensi Stunting	0.743
3	Mengurangi AKI	0.842
4	Mengurangi AKBa	1.071
5	Mengurangi AKN	1.322
6	Meningkatkan RLS	0.862
7	Mengurangi angka tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	0.998
8	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir	1.802
9	Meningkatkan APK PT	2.050
10	Meningkatkan APM SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	1.879
11	Meningkatkan share PDRB industri manufaktur	2.253
12	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B	2.207
13	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD	1.520

(Sumber: Data diolah, 2023)

Berdasarkan peringkat isu-isu tersebut, kemiskinan memiliki bobot terendah, yaitu 0.687, menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan adalah hal yang paling mendesak di Kota Gorontalo. Kemiskinan merupakan

tantangan serius yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program-program untuk mengatasi kemiskinan harus dipertimbangkan dengan cermat, dengan fokus pada keberlanjutan dan inklusivitas agar memberikan dampak jangka panjang bagi kelompok rentan di Kota Gorontalo. Meskipun demikian, perhatian juga diperlukan terhadap isu-isu terkait lainnya yang memiliki dampak besar, seperti isu kesehatan (stunting) dan isu pendidikan (partisipasi sekolah). Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Gorontalo.

Secara parsial, ketigabelas isu diatas dapat diurutkan prioritasnya berdasarkan lima faktor pendukung pencapaian SDGs. Dengan demikian, pemerintah Kota Gorontalo dapat menetapkan prioritas isu-isu pembangunan secara lebih spesifik yang paling penting untuk diatasi. Misalnya, pada kriteria anggaran, isu kemiskinan mendapat bobot terendah. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dukungan anggaran dinilai masih belum cukup kuat atau belum cukup mengakomodir upaya pengentasan kemiskinan. Berikut urutan prioritas isu-isu SDGs berdasarkan lima faktor pendukung pencapaiannya di Kota Gorontalo:

Tabel 6 Prioritas Isu SDGs Berdasarkan Faktor Pendukung

Dukungan Anggaran		
No	Faktor/Isu	Bobot
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	1.052
2	Meningkatkan RLS	1.052
3	Mengurangi Prevalensi Stunting	1.081
4	Mengurangi angka tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	1.140
5	Mengurangi AKI	1.169
6	Mengurangi AKBa	1.403
7	Mengurangi AKN	1.929
8	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD	2.046
9	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir	2.250

10	Meningkatkan APM SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	2.279
11	Meningkatkan APK PT	2.688
12	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B	2.951
13	Meningkatkan share PDRB industri manufaktur	2.981
Dukungan RPJMD		
No	Faktor/Isu	Bobot
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	0.717
2	Mengurangi Prevalensi Stunting	0.797
3	Meningkatkan RLS	0.903
4	Mengurangi AKI	0.983
5	Mengurangi angka tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	1.195
6	Mengurangi AKBa	1.354
7	Mengurangi AKN	1.407
8	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir	2.098
9	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD	2.151
10	Meningkatkan APK PT	2.310
11	Meningkatkan APM SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	2.443
12	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B	2.656
13	Meningkatkan share PDRB industri manufaktur	2.735
Dukungan Regulasi		
No	Faktor/Isu	Bobot
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	0.723
2	Mengurangi Prevalensi Stunting	0.770
3	Mengurangi AKI	0.910
4	Meningkatkan RLS	0.933
5	Mengurangi AKBa	1.143
6	Mengurangi angka tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	1.260
7	Mengurangi AKN	1.377
8	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD	1.400

9	Meningkatkan APM SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	1.937
10	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir	1.960
11	Meningkatkan APK PT	2.147
12	Meningkatkan share PDRB industri manufaktur	2.240
13	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B	2.310
Dukungan Kemitraan		
No	Faktor/Isu	Bobot
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	0.507
2	Mengurangi Prevalensi Stunting	0.540
3	Mengurangi AKI	0.574
4	Meningkatkan RLS	0.726
5	Mengurangi angka tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	0.743
6	Mengurangi AKBa	0.760
7	Mengurangi AKN	0.963
8	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD	1.098
9	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir	1.419
10	Meningkatkan APM SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	1.452
11	Meningkatkan APK PT	1.638
12	Meningkatkan share PDRB industri manufaktur	1.706
13	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B	1.756
13	Meningkatkan share PDRB industri manufaktur	1.602
Dukungan Kelembagaan		
No	Faktor/Isu	Bobot
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	0.438
2	Mengurangi Prevalensi Stunting	0.529
3	Mengurangi AKI	0.574
4	Mengurangi angka tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	0.650
5	Mengurangi AKBa	0.695
6	Meningkatkan RLS	0.695
7	Meningkatkan Pajak Daerah/PAD	0.907

8	Mengurangi AKN	0.937
9	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir	1.284
10	Meningkatkan APM SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	1.284
11	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B	1.360
12	Meningkatkan APK PT	1.466
13	Meningkatkan share PDRB industri manufaktur	1.602

(Sumber: Data diolah, 2023)

Kemiskinan masih tetap menjadi isu utama yang harus mendapatkan prioritas dalam penanganannya. Isu kemiskinan memiliki bobot terendah dalam setiap aspek pendukung, yaitu 1.052 untuk dukungan anggaran, 0.717 untuk dukungan RPJMD, 0.723 untuk dukungan regulasi, 0.507 untuk dukungan kemitraan, dan 0.438 untuk dukungan kelembagaan. Dalam aspek anggaran, nilai 1.052 pada isu kemiskinan menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan membutuhkan alokasi anggaran yang memadai untuk mendorong pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta perluasan jaringan keamanan sosial. Dalam konteks RPJMD, nilai 0.717 pada isu kemiskinan menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengakui pentingnya menanggulangi kemiskinan dengan lebih terencana dalam merancang kebijakan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Dalam aspek regulasi, isu kemiskinan mendapatkan bobot terendah (0.723), menandakan perlunya revisi dan peningkatan regulasi untuk memastikan keberlanjutan program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal. Evaluasi lebih lanjut terhadap regulasi terkait distribusi bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pembangunan sektor ekonomi dapat membantu memastikan bahwa regulasi tersebut memberikan dukungan optimal dalam mengatasi kemiskinan di Kota Gorontalo. Sementara itu, dalam hal kemitraan dan kelembagaan, isu kemiskinan juga mendapatkan bobot terendah, yaitu 0.507 dan 0.438. Dukungan kemitraan menitikberatkan pada kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembobotan isu kemiskinan di Kota Gorontalo menunjukkan perlunya implementasi kerjasama yang lebih sinergis

untuk merancang program inklusif, seperti pelatihan keterampilan bagi masyarakat rentan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pemerataan akses ke sumber daya ekonomi.

Dalam hal dukungan kelembagaan, kemiskinan juga menjadi isu prioritas yang membutuhkan perhatian utama lembaga-lembaga pemerintahan di Kota Gorontalo. Hal ini menandakan tantangan terhadap kesiapan lembaga-lembaga dalam menghadapi kompleksitas masalah kemiskinan di tingkat lokal. Namun demikian, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala yang mungkin dihadapi oleh lembaga-lembaga terkait serta untuk mengukur tingkat keterlibatan dan sinergi antar lembaga dalam menghadapi isu ini. Disamping penguatan kapasitas lembaga, koordinasi antar lembaga lintas-sektor juga menjadi langkah penting agar upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya bersifat sektoral tetapi juga terintegrasi secara holistik.

Selain masalah kemiskinan, isu pendidikan (rata-rata lama sekolah) dan isu kesehatan (stunting) memiliki bobot yang hampir setara dengan isu kemiskinan. Hal ini menandakan bahwa peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan menjadi isu penting lainnya yang harus diperhatikan dalam meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia di Kota Gorontalo. Diperlukan alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta memastikan akses yang merata terhadap pendidikan dan fasilitas kesehatan. Peningkatan isu-isu pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi prioritas dalam RPJMD yang menunjukkan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya strategi dan kebijakan untuk mencapai target SDGs terkait isu tersebut.

Dalam aspek dukungan regulasi, kemitraan dan kelembagaan, isu pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas yang hampir setara dengan isu kemiskinan. Isu stunting mendapat bobot yang lebih rendah dalam aspek dukungan regulasi sehingga diperlukan kajian lebih mendalam terhadap regulasi yang terkait dengan gizi, pelayanan kesehatan masyarakat, dan program-program pencegahan stunting. Peningkatan regulasi ini dapat meningkatkan efektivitas program penanggulangan stunting yang telah diimplemetasikan. Dalam aspek kemitraan, upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kualitas

kesehatan dan pendidikan. Pemberian informasi, dukungan pelayanan, dan edukasi masyarakat perlu menjadi bagian dari inisiatif bersama antar pemangku kepentingan.

Dalam aspek kelembagaan, isu-isu SDGs memiliki dimensi yang bersifat multidimensional. Oleh karena itu, integrasi aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan ekonomi dalam lembaga-lembaga perangkat daerah menjadi sangat penting. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan tim lintas-sektor yang dapat mengoordinasikan berbagai program kerja antar sektor. Peran kelembagaan dalam mengatasi keseluruhan isu SDGs yang dihadapi di Kota Gorontalo tidak hanya berjalan melalui pendekatan *top-down* tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat lokal. Mendorong inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan keberlanjutan dan dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah.

Disisi lain, hasil pembobot yang tinggi pada isu-isu perekonomian, seperti peningkatan porsi PDRB industri manufaktur dalam aspek dukungan anggaran, RPJMD, dan kelembagaan, serta persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B dalam aspek dukungan regulasi dan kemitraan, memberikan gambaran menarik terkait pencapaian sektor ekonomi di Kota Gorontalo. Peningkatan porsi PDRB industri manufaktur dengan bobot tertinggi pada aspek dukungan anggaran (2.981), RPJMD (2.735), dan kelembagaan (1.602) menunjukkan bahwa sektor manufaktur telah menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Kota Gorontalo. Kinerja positif ini dapat diartikan sebagai hasil dari kebijakan dan program yang telah berhasil diimplementasikan oleh pemerintah.

Sementara itu, bobot tinggi pada persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B dalam aspek dukungan regulasi (2.310) dan kemitraan (1.756) menandakan bahwa Kota Gorontalo telah berhasil meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kebijakan ekonomi serta mendorong kemitraan yang baik dengan sektor swasta dan masyarakat. Peningkatan bobot pada indikator ini menggambarkan bahwa pemerintah telah sukses dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, perlu dicatat bahwa bobot yang tinggi bukan berarti isu tersebut tidak memerlukan perhatian lebih lanjut.

Diperlukan langkah yang konsisten dalam memastikan keberlanjutan dan relevansi strategi dalam konteks pembangunan ekonomi.

Secara keseluruhan, pembobotan isu-isu pembangunan di Kota Gorontalo memberikan gambaran yang sangat penting tentang pencapaian SDGs di tingkat lokal. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa pengidentifikasian indikator dan penguraian isu prioritas ini hanya mencerminkan titik awal dari upaya pembangunan yang berkelanjutan. Diperlukan komitmen yang kuat dan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa prioritas-prioritas yang ditetapkan tetap relevan dan strategi-strategi yang diterapkan terus berjalan efektif. Dengan demikian, Kota Gorontalo dapat terus bergerak maju dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Penjabaran pada bab ini menggarisbawahi bahwa upaya pembangunan adalah proses yang berkelanjutan dimana proses perencanaan, implementasi, adaptasi, dan evaluasi harus dilakukan secara terus menerus untuk memastikan bahwa segala bentuk pembangunan yang dilakukan mengarah pada pencapaian Agenda Global 2030.

4.3.3 Tantangan dan Peluang

Kemiskinan masih menjadi isu utama yang memerlukan perhatian serius di Kota Gorontalo. Meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini, tantangan yang dihadapi dalam aspek anggaran, regulasi, kemitraan, dan kelembagaan masih cukup signifikan. Selain kemiskinan, isu-isu lain seperti pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian penting yang menunjukkan masih diperlukannya perbaikan infrastruktur dan kualitas layanan di sektor-sektor tersebut. Di sisi lain, sektor ekonomi menunjukkan kinerja yang lebih positif terutama dalam kontribusi industri manufaktur terhadap PDRB serta peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah yang tercermin dari tingginya persentase instansi dengan SAKIP \geq B. Pemahaman lebih dalam mengenai tantangan dan peluang dalam penanggulangan kemiskinan serta isu-isu pembangunan lainnya di Kota Gorontalo selanjutnya dapat digali lebih dalam melalui pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau yang dikenal dengan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*). Pendekatan ini dapat memberikan gambaran komprehensif dan dasar strategis

untuk merancang kebijakan dan program yang lebih efektif dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal.

Strengths (Kekuatan)

1. Pengakuan Pemerintah Daerah

Pengakuan dari pemerintah daerah tentang pentingnya penanggulangan kemiskinan tercermin dalam dukungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki nilai 0.717. Nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memasukkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Pengakuan ini juga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran serta memberikan landasan kuat bagi implementasi program-program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

2. Kinerja Sektor Ekonomi

Kinerja sektor ekonomi, terutama industri manufaktur, menunjukkan kekuatan signifikan dengan bobot tinggi dalam berbagai aspek dukungan. Dukungan anggaran (2.981), RPJMD (2.735), dan kelembagaan (1.602) terhadap industri manufaktur mencerminkan bahwa sektor ini menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Kota Gorontalo. Keberhasilan sektor manufaktur tidak hanya berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong perkembangan sektor-sektor lain. Kinerja yang kuat ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah daerah telah berhasil memfasilitasi pertumbuhan industri manufaktur, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan menyediakan lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat.

3. Akuntabilitas dan Transparansi

Tingginya persentase instansi pemerintah dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B dalam aspek dukungan regulasi (2.310) dan kemitraan (1.756) mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan

kebijakan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Gorontalo telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta dalam berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa alokasi sumber daya dilakukan secara adil dan tepat sasaran.

Kekuatan-kekuatan ini memberikan fondasi yang kuat bagi upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan di Kota Gorontalo. Dengan pengakuan yang jelas dari pemerintah daerah, kinerja sektor ekonomi yang baik, dan peningkatan akuntabilitas serta transparansi, Kota Gorontalo memiliki potensi besar untuk mencapai target-target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui optimalisasi kekuatan-kekuatan ini, diharapkan berbagai tantangan yang ada, khususnya isu kemiskinan, dapat diatasi dengan lebih efektif.

Weaknesses (Kelemahan)

1. Dukungan anggaran untuk kemiskinan

Nilai 1.052 yang mencerminkan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia saat ini masih jauh dari cukup untuk menangani masalah kemiskinan dengan efektif. Keterbatasan dana ini berakibat pada terbatasnya jangkauan program-program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan jaringan keamanan sosial. Akibatnya, banyak inisiatif yang seharusnya dapat memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan tidak dapat dijalankan secara optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran juga membuat program-program yang ada sulit untuk diimplementasikan secara berkelanjutan berdampak dan luas sehingga mengurangi efektivitas penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

2. Dukungan Regulasi dan Kemitraan

Nilai terendah pada aspek dukungan regulasi (0.723) dan kemitraan (0.507) menandakan bahwa ada kekurangan signifikan dalam hal kebijakan dan kolaborasi. Regulasi yang ada diidinkasikan belum cukup

komprehensif atau belum dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung program-program penanggulangan kemiskinan. Tanpa regulasi yang kuat, program-program sosial dan ekonomi yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan tidak akan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Sementara itu dalam hal kemitraan, skor yang rendah menunjukkan kurangnya kerjasama yang sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kerjasama yang lemah ini bisa disebabkan oleh kurangnya komunikasi, visi yang tidak selaras, atau ketidakpercayaan antar pemangku kepentingan.

3. Kelembagaan

Dengan nilai terendah pada dukungan kelembagaan (0.438) terlihat jelas bahwa kesiapan lembaga-lembaga di Kota Gorontalo dalam menghadapi masalah kemiskinan masih sangat kurang. Tantangan besar ini mencakup kurangnya kapasitas teknis dan manajerial dalam lembaga-lembaga pemerintahan, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, serta struktur organisasi yang belum sepenuhnya mendukung koordinasi lintas sektor yang efektif. Disamping itu, lembaga-lembaga yang ada mungkin belum mampu mengakomodasi dan mengelola kompleksitas masalah kemiskinan yang sering kali memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan multidisiplin. Hambatan-hambatan ini dapat menyebabkan kurangnya responsivitas dan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi yang berubah dengan cepat. Koordinasi yang lemah antara lembaga-lembaga pemerintah juga dapat menyebabkan tumpang tindih program, inefisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan kurangnya dampak nyata dari inisiatif pencapaian target SDGs. Kondisi ini menghambat kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap kebutuhan mendesak dan mengimplementasikan solusi yang adaptif terhadap situasi lokal.

Guna mengatasi kelemahan-kelemahan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, peningkatan alokasi anggaran yang signifikan, revisi dan penguatan regulasi, serta pembangunan kemitraan yang lebih erat dan sinergis. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa program-program

pemerintah dalam upaya pencapaian target SDGs dapat dijalankan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Opportunities (Kesempatan)

1. Revisi dan penguatan regulasi

Peluang utama dalam mengatasi sejumlah isu prioritas adalah dengan merevisi dan memperbaiki regulasi yang ada. Regulasi yang kuat dan tepat sasaran merupakan fondasi penting untuk memastikan keberhasilan berbagai program pembangunan, termasuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, regulasi terkait perlu ditinjau ulang untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial, memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, dan distribusinya transparan serta akuntabel. Selain itu, regulasi yang mendukung program pelatihan keterampilan bagi masyarakat rentan harus diperkuat untuk meningkatkan kapasitas individu sesuai kebutuhan pasar kerja lokal. Dukungan untuk pemberdayaan ekonomi lokal, seperti insentif bagi usaha kecil dan menengah (UKM) juga perlu diperluas untuk membantu UKM berkembang dan menciptakan lapangan kerja.

Pada sektor pendidikan dan kesehatan, peningkatan regulasi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Regulasi yang mendukung akses merata terhadap pendidikan berkualitas perlu diperkuat, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan penetapan standar pendidikan yang tinggi. Untuk mencegah dan menangani masalah stunting, regulasi terkait gizi dan kesehatan masyarakat harus ditingkatkan, mencakup kebijakan wajib gizi di sekolah, program penyuluhan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan akses ke layanan kesehatan berkualitas. Regulasi yang mendukung peningkatan layanan kesehatan harus mencakup pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan peralatan medis yang memadai, serta pelatihan bagi tenaga kesehatan, dengan fokus pada pemerataan layanan kesehatan di daerah terpencil.

Kemitraan yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat memerlukan kerangka regulasi yang mendukung kolaborasi. Regulasi yang mendukung kemitraan publik-swasta perlu

ditingkatkan untuk memfasilitasi kolaborasi dalam proyek-proyek pembangunan, seperti infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal. Pengaturan kemitraan dengan masyarakat juga harus diperkuat untuk mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan, serta memastikan inisiatif masyarakat terakomodasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, regulasi yang memperkuat kapasitas dan koordinasi antar lembaga pemerintah sangat penting untuk memastikan upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan kesehatan berjalan secara terpadu dan efektif. Dengan revisi dan penguatan regulasi yang tepat, Kota Gorontalo dapat membangun kerangka kerja yang lebih kokoh, mendukung berbagai program pembangunan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Kerjasama sinergis multi-pihak

Kerjasama sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan program-program inklusif yang memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Sinergi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya penanggulangan kemiskinan serta mengatasi isu-isu pembangunan lainnya. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kerjasama sinergis ini:

(a) Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta

Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan inisiatif ekonomi lokal, seperti mendirikan usaha kecil dan menengah (UKM), yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Sementara itu, sektor swasta dapat berkontribusi dalam peningkatan infrastruktur melalui program kemitraan pemerintah-swasta yang pada umumnya berbentuk investasi pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi yang dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi dalam bidang teknologi juga dapat membantu memperkenalkan solusi inovatif yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor-sektor ekonomi.

(b) Pemberdayaan Komunitas oleh Pemerintah dan LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi non-pemerintah dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan program pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat miskin. Program ini bisa meliputi pelatihan keterampilan, literasi keuangan, dan pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Program-program pemberdayaan ini dapat membantu memperkuat ikatan komunitas dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan lokal. Sebagai contoh, program pengembangan komunitas dengan fokus pada kesehatan ibu dan anak dapat menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak.

(c) Partisipasi aktif masyarakat

Masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait program-program pembangunan. Pendekatan *bottom-up* ini memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah. Disamping itu, partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi media pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.

(d) Mekanisme Pembiayaan yang Inovatif

Pemerintah dapat mengadopsi skema *blended financing* yang melibatkan dana publik dan investasi swasta untuk mendanai proyek-proyek sosial dan ekonomi. Skema ini dapat mengurangi risiko bagi investor swasta dan meningkatkan akses terhadap modal bagi proyek-proyek yang berorientasi sosial. Selain dana investor, masyarakat dan organisasi filantropi dapat berpartisipasi dalam pendanaan program-program sosial melalui platform *crowdfunding*. Inisiatif ini memungkinkan individu dan kelompok untuk berkontribusi secara langsung terhadap proyek-proyek yang mereka anggap penting.

3. Integrasi SDGs dalam perangkat daerah

Ada peluang besar untuk mengintegrasikan isu-isu pendidikan, kesehatan, dan ketahanan ekonomi dalam lembaga-lembaga perangkat daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya pembangunan

holistik dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain meliputi:

- (a) Pembentukan tim lintas-sektor yang terdiri dari berbagai dinas dan lembaga terkait untuk mengoordinasikan program-program yang mendukung pencapaian SDGs. Tim ini akan memastikan bahwa program di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi saling mendukung dan terintegrasi.
- (b) Pengembangan program terpadu yang secara simultan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Contohnya, program kesehatan sekolah yang tidak hanya meningkatkan gizi dan kesehatan siswa, tetapi juga memberikan pendidikan keterampilan hidup dan pelatihan ekonomi kepada keluarga para peserta didik.
- (c) Pemantauan dan evaluasi terpadu untuk mengukur dampak dari berbagai inisiatif dan program terkait SDGs. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menyesuaikan dan meningkatkan efektivitas program.

Threats (Ancaman atau Hambatan)

1. Hambatan kelembagaan

Kesiapan lembaga-lembaga dalam menghadapi kompleksitas isu prioritas SDGs masih menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun pemahaman tentang pentingnya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan upaya pencegahan stunting telah diakui, namun kemampuan lembaga-lembaga dalam merespons secara efektif terhadap isu-isu ini masih rendah. Kurangnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam analisis kebijakan dan implementasi program juga menjadi faktor yang penting lainnya dalam mengatasi hambatan ini. Tanpa kesiapan yang memadai dari lembaga-lembaga terkait, upaya pencapaian target SDGs mungkin tidak akan berjalan dengan lancar atau efektif.

2. Ketidakpastian dukungan regulasi

Ketidakpastian dalam dukungan regulasi dapat menjadi hambatan serius dalam mencapai tujuan percepatan pencapaian target SDGs di tingkat lokal. Regulasi yang tidak memadai atau tidak tepat sasaran dapat menghambat implementasi program-program pembangunan yang

efektif. Misalnya, kurangnya regulasi yang mengatur secara jelas distribusi bantuan sosial atau pelayanan kesehatan masyarakat dapat menyebabkan ketidakmerataan akses atau penyalahgunaan dana, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, perubahan kebijakan atau regulasi yang tidak konsisten dari waktu ke waktu juga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan jangka panjang dan menghambat upaya mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, G., & Surya, R. Z. (2019). Analisa Ketersediaan Data SDGs di Kabupaten Indragiri Hulu. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 5(Nomor 2). <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v5iNomor>
- Arham, M. A., Payu, B. R., Tantawi, R., Kusuma, C. A., Panigoro, N., Toralawe, Y. (2023). Potret Awal Pencapaian SDGs Pilar Ekonomi Kawasan Teluk Tomini. *Penerbit Tahta Media*.
- Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo. (n.d.). Retrieved May 5, 2024, from <https://gorontalokota.bps.go.id/publication/2020/02/28/8feb21a07450334be2dfb5fb/kota-gorontalo-dalam-angka-2020--penyediaan-data-untuk-perencanaan-pembangunan.html>
- Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf*. (n.d.). Retrieved May 12, 2024, from <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf>
- Hák, T., Janoušková, S., & Moldan, B. (2016). Sustainable Development Goals: A need for relevant indicators. *Ecological Indicators*, 60, 565–573. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.08.003>
- Kanie, N., & Biermann, F. (2017). *Governing Through Goals: Sustainable Development Goals as Governance Innovation*. MIT Press.
- Metadata-Pilar-Ekonomi-Edisi-II.pdf*. (n.d.). Retrieved May 12, 2024, from <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2020/10/Metadata-Pilar-Ekonomi-Edisi-II.pdf>
- Metadata-Pilar-Hukum-Edisi-II.pdf*. (n.d.). Retrieved May 12, 2024, from <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2024/01/Metadata-Pilar-Hukum-Edisi-II.pdf>
- Metadata-Pilar-Lingkungan-Edisi-II_REV3.pdf*. (n.d.). Retrieved May 12, 2024, from https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Metadata-Pilar-Lingkungan-Edisi-II_REV3.pdf

- Metadata-Pilar-Sosial-Edisi-II.pdf*. (n.d.). Retrieved May 12, 2024, from <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2020/10/Metadata-Pilar-Sosial-Edisi-II.pdf>
- Muzakir, M., & Suparman, S. (2016). Strategy of Developing Tomini Bay for Economic Growth of Coastal Community in Central Sulawesi. *JEJAK*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/jejak.v9i1.7189>
- Nash, K. L., Blythe, J. L., Cvitanovic, C., Fulton, E. A., Halpern, B. S., Milner-Gulland, E. J., Addison, P. F. E., Pecl, G. T., Watson, R. A., & Blanchard, J. L. (2020). To Achieve a Sustainable Blue Future, Progress Assessments Must Include Interdependencies between the Sustainable Development Goals. *One Earth*, 2(2), 161–173. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.01.008>
- Vaidya, O. S., & Kumar, S. (2006). Analytic hierarchy process: An overview of applications. *European Journal of Operational Research*, 169(1), 1–29. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.04.028>
- Yunginger, R., Amali, L. N., Kandowangko, N. Y., Amalia, L., Supu, I., Papeo, D. R. P., Dama, M., & Supartin. (2023). Potret Awal Pencapaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kawasan Teluk Tomini. *Penerbit Tahta Media*. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/339>